

**Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat**



**Rencana Kontingensi
Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Kabupaten Pesisir Selatan**

Tahun 2023

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah :

1. Komitmen Pengerahan Sumberdaya Secara Optimal Untuk Penanganan Kedaruratan
2. Tanggal Mulai Berlaku
3. Tanggal Kadaluarsa
4. Jadwal Pemutakhiran
5. Klausul Yang Mewajibkan Semua Pihak Mematuhi Perencanaan Kontingensi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di Pantai Barat Sumatera, yaitu antara 0° 57' 31.21" - 2° 28' 42.32" LS dan 100° 17' 48.64" - 101° 17' 34.3" BT. Kabupaten ini memiliki luas daratan 6.049,33 km² (604.934 ha), dengan panjang pantai mencapai 234 km, jumlah pulau 47 pulau dan 23 sungai besar serta ketinggian dari permukaan laut 0 - 1000 meter.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki bentang alam cukup variatif berupa pantai, dataran, perbukitan dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, Kabupaten Pesisir Selatan juga menghadapi kompleksitas bahaya, yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun sosial. Dengan letak dan karakteristik tersebut, menempatkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang sangat rawan terhadap bencana.

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan 2013-2018, menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 6 ancaman yang risiko yang relatif tinggi antara lain banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Rencana Kontingensi Bencana Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Mentawai ini merupakan dokumen formal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumen ini disusun agar dapat menjadi acuan operasional penanganan situasi kedaruratan bencana tsunami yang diakibatkan gempa bumi secara efektif, efisien dan sesuai peraturan perundangan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Substansi pokok dalam dokumen adalah tentang kebijakan, strategi, langkah-langkah, pembagian peran-tugas, dan mekanisme mengerahkan sumberdaya dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan kedaruratan. Bertujuan untuk memastikan perlindungan masyarakat dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Rencana kontingensi ini juga memuat tentang keterlibatan seluruh unsur pentahelix.

Tatalaksana penanganan kedaruratan dalam rencana kontingensi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan skenario kejadian dan perkiraan/asumsi akibat/dampak langsung bencana. Skenario dan asumsi dampak tersebut merujuk pada data-informasi hasil pengkajian dan pemodelan dari instansi otoritas/pemangku utama, seperti BMKG, BNPB, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Pesisir Selatan , dan sumber relevan lainnya.

Sebagai perangkat kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan penanggulangan kedaruratan bencana, diharapkan rencana ini dapat dapat digunakan dan dipahami sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, rencana kontingensi ini agar dapat menjadi salah satu dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Mentawai di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	PENJELASAN
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
BAPEDA LITBANG	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BNPP	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
B2PJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BIG	Badan Informasi Geospasial
BMKG	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPKPAD	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTT	Biaya Tidak Terduga
BUD	Bendahara Umum Daerah
BULOG	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
DINKES	Dinas Kesehatan
DINSOSPPA	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DISHUB	Dinas Perhubungan
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika
DISPARPORA	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
DISPERKIMTA NLH	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup
DPMDPPKB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DISPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DSP	Dana Siap Pakai
DTA	Daerah Tangkapan Air
ESDM	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
ETA	<i>Estimation Time of Arrival</i>
ETH	<i>Estimation Tsunami Height</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
EWS	<i>Early Warning System</i>
HT	<i>Handy Talkie</i>
IATSI	Ikatan Ahli Tsunami Indonesia
KBG	Kekerasan Berbasis Gender
KEMENAG	Kementerian Agama
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KODIM	Komando Distrik Militer
KORAMIL	Komando Rayon Militer
KUA	Kantor Urusan Agama
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MMI	<i>Modified Mercalli Intensity</i>
NGO	<i>Non Government Organization</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	Organisasi Amatir Radio Indonesia
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PMI	Palang Merah Indonesia
POLAIRUD	Kepolisian Perairan dan Udara
POLRES	Kepolisian Resor
POLSEK	Kepolisian Sektor
POL PP	Polisi Pamong Praja
POLRI	Polisi Republik Indonesia
POSKO	Pos Komando
POSMIL	Pos Militer
PUSDALOPS	Pusat Pengendalian Operasi
PUSGEN	Pusat Studi Gempa Nasional
RAB	Rancangan Anggaran Biaya
RAPI	Radio Antar Penduduk Indonesia
RENKON	Rencana Kontingensi
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SATPOL PP dan DAMKAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SETDA	Sekretariat Daerah
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
STAI	Sekolah Tinggi Agama Islam
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah

SINGKATAN	PENJELASAN
UPJ PLN	Unit Pelayanan Jaringan Perusahaan Listrik Negara
UNP	Universitas Negeri Padang
TAGANA	Taruna Siaga Bencana
TEA	Tempat Evakuasi Akhir
TELKOM	Telekomunikasi
TES	Tempat Evakuasi Sementara
TKP	Tempat Kejadian Perkara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TP-PKK	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TRC	Tim Reaksi Cepat
TTX	<i>Table Top Exercise</i>
WASH	<i>Water Sanitation and Hygiene</i>
WRS	<i>Warning Receiver System</i>

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5. Kebijakan dan Strategi	6
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	8
1.7. Umpan Balik	8
1.8. Masa Berlaku dan Pematkhiran	8
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	9
BAB II. SITUASI	10
2.1. Karakteristik Bahaya	10
2.2. Skenario Kejadian.....	12
2.3. Asumsi Dampak.....	16
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	25
3.1. Tugas Pokok	25
3.2. Sasaran	25
BAB IV PELAKSANAAN	27
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan.....	27
4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana	x
4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan	x
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok	29
4.3. Struktur Organisasi Komando	32
4.4. Tugas-Tugas Bidang.....	33
1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi	x
2. Bidang Administrasi, Keuangan dan Pelaporan	x

3. Bidang Perencanaan	X
4. Bidang Operasi	X
5. Bidang Logistik dan Peralatan	X
6. Pos Lapangan	X
4.5. Instruksi Koordinasi	40
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	43
5.1. Administrasi	43
5.2. Logistik	45
BAB VI PENGENDALIAN	46
6.1. Komando	46
6.2. Kendali	49
6.3. Koordinasi	49
6.4. Komunikasi	49
6.5. Informasi	51
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	52
7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan	52
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	52
LAMPIRAN	54
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.	54
Lampiran 2. Proyeksi dampak	56
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas	62
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	66
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan Sumber Daya	67
Lampiran 6. Album Peta	76
1. Peta Bahaya	76
2. Peta Rencana Evakuasi	77
3. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan	93
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini	94
Lampiran 8. Rencana Evakuasi	95

Lampiran 9. SOP / Protap	97
Lampiran 10. Lembar Komitmen	121
Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan	125
Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi	128

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan ibukota berada di kecamatan IV Jurai, tepatnya di Painan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah luas daratan 6.049,33 km² (604.934 Ha). Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 516.518 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan dan 182 Desa Kabupaten Pesisir Selatan secara astronomis terletak pada 0° 57' 31.21" - 2° 28' 42.32" LS dan 100° 17' 48.64" - 101° 17' 34.3" BT. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kota Padang di sebelah Utara, Kota Padang, Bagian Timur Kabupaten Solok , Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muko-Muko di sebelah Selatan, Samudra Hindia di sebelah Barat.

Kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki risiko terpapar bencana tsunami. Untuk itu maka, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah menyusun perencanaan kontingensi.

Perencanaan kontingensi disusun dan disepakati sebagai pedoman atau panduan arah kebijakan, strategi, dan langkah untuk menangani kedaruratan atau situasi krisis akibat bencana. Disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait, perencanaan kontingensi menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
27. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kluster Logistik Penanggulangan Bencana
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana
30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB)
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana

43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
48. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
51. Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
52. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan Darurat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana dan sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana, yaitu :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan darurat bencana gempa dan tsunami merupakan arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya, dan mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempabumi secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
3. Optimalisasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan untuk penanganan kedaruratan bencana.
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas penanganan kedaruratan, termasuk BTT APBD Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat.
5. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
6. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, Lembaga Pendidikan, lembaga non pemerintah, dan luar negeri.

7. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan.
8. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
9. Permohonan keringanan kredit korban terdampak.
10. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum tentang kebijakan diimplementasikan selama operasi penanganan darurat guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah :

1. Mengaktifkan kembali Sistem Peringatan Dini Tsunami.
2. Membentuk dan mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan kedaruratan bencana.
4. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
5. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
6. Perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital untuk pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
7. Pembuatan pos layanan dan bantuan.
8. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan.
9. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi.
10. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*.
11. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
12. Monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana di semua sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanganan darurat bencana tentang pentingnya rencana kontingensi tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanganan darurat bencana (multi stakeholder).

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pemutakhiran dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau periode 2023-2025. Agar rencana kontingensi ini sesuai dengan perkembangan dan situasi terbaru, dapat dilakukan kaji ulang atau pemutakhiran sesuai kebutuhan. Beberapa aspek yang dapat

digunakan sebagai parameter pemutakhiran antara lain adalah perubahan dinamika/skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan gempa dan Tsunami di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Langkah konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi bisa dilihat pada Lampiran 1.

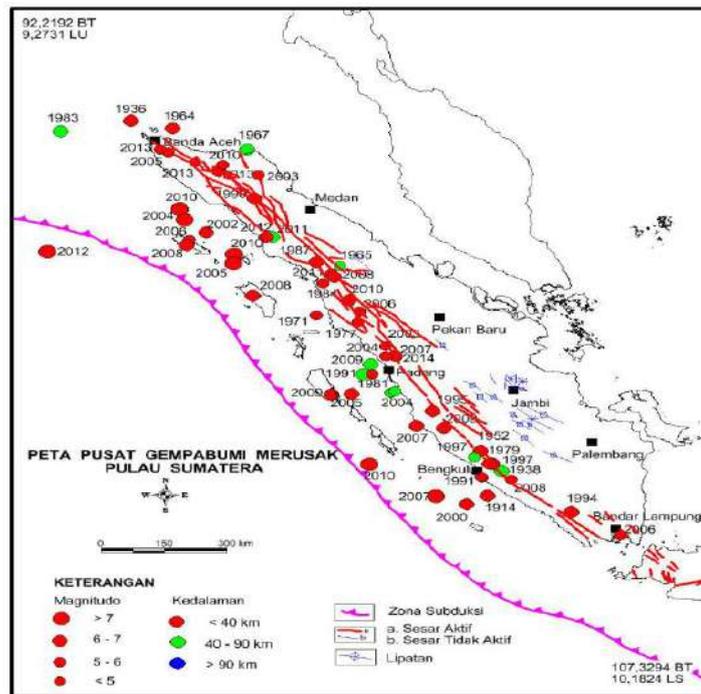
BAB II. SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Banyak pulau di Indonesia, termasuk Sumatera, terletak di dalam zona aktivitas seismik tinggi yang dikenal sebagai Cincin Api. Kegiatan tektonik di kawasan Pulau Sumatera dan sekitarnya tergolong aktif sejak Paleozoikum – Mesozoikum – Tersier hingga sekarang ini yang diikuti oleh pembentukan jalur orogenesis di wilayah ini. Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan yang terletak pada pinggir lempeng aktif (active plate margin), yang dicerminkan oleh tingkat kegempaan tinggi dan aktivitas vulkanisme di wilayah ini.

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Lempeng Eurasia yang bergerak sangat lambat relatif ke arah tenggara dengan kecepatan sekitar 0,4 cm/ tahun, berinteraksi dengan Lempeng Hindia – Australia yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang bergerak relatif ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm/ tahun (Minster dan Jordan, 1978 dalam Yeats, 1997). Zona pertemuan antara kedua lempeng tersebut membentuk palung dengan kedalaman berkisar 4.500 meter hingga 7.000 meter, yang dikenal dengan nama zona tumbukan atau zona subduksi.

Penunjaman di Pulau Sumatera bersifat oblique, membentuk sudut sekitar 50° - 65° (Simanjuntak dan Barber, 1996). Zona subduksi merupakan sumber gempabumi di laut yang berpotensi membangkitkan tsunami apabila gempabumi tersebut magnitudonya besar (umumnya lebih dari 6,5 Skala Richter), kedalaman dangkal (umumnya kurang dari 40 km), mekanismenya patahan naik atau turun serta terjadi perubahan morfologi secara vertikal (dislokasi) di bawah laut. Subduksi mengakibatkan banyak kejadian gempabumi.



Provinsi Sumatra Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia). Akibat tumbukan kedua lempeng besar ini selanjutnya muncul gejala tektonik lainnya yaitu busur magmatik yang ditandai dengan munculnya rangkaian pengunungan bukit barisan beserta gunungapinya dan sesar/patahan sumatera yang memanjang dengan zona tumbukan kedua lempeng yaitu utara-selatan.

Gempabumi yang terjadi dapat berkekuatan besar, kedalaman dangkal, dan mekanisme sesar/patahan naik yang berpotensi mengakibatkan terjadinya tsunami. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali.

Selain terletak diantara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami.

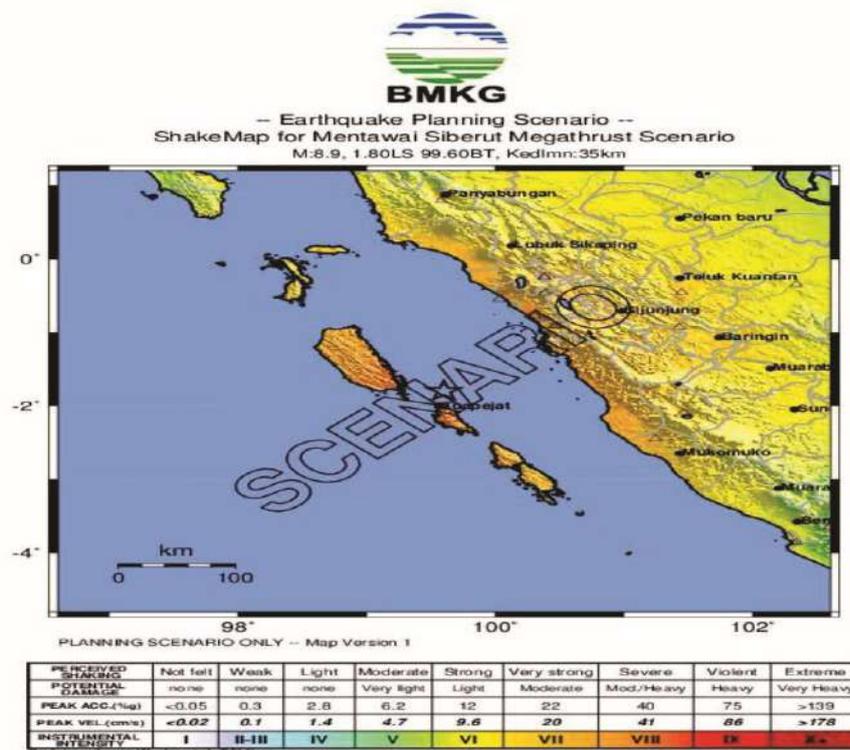
Menurut BMKG, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi gempabumi yang bersumber dari subduksi lempeng pada 2 segmen megathrust yaitu segmen

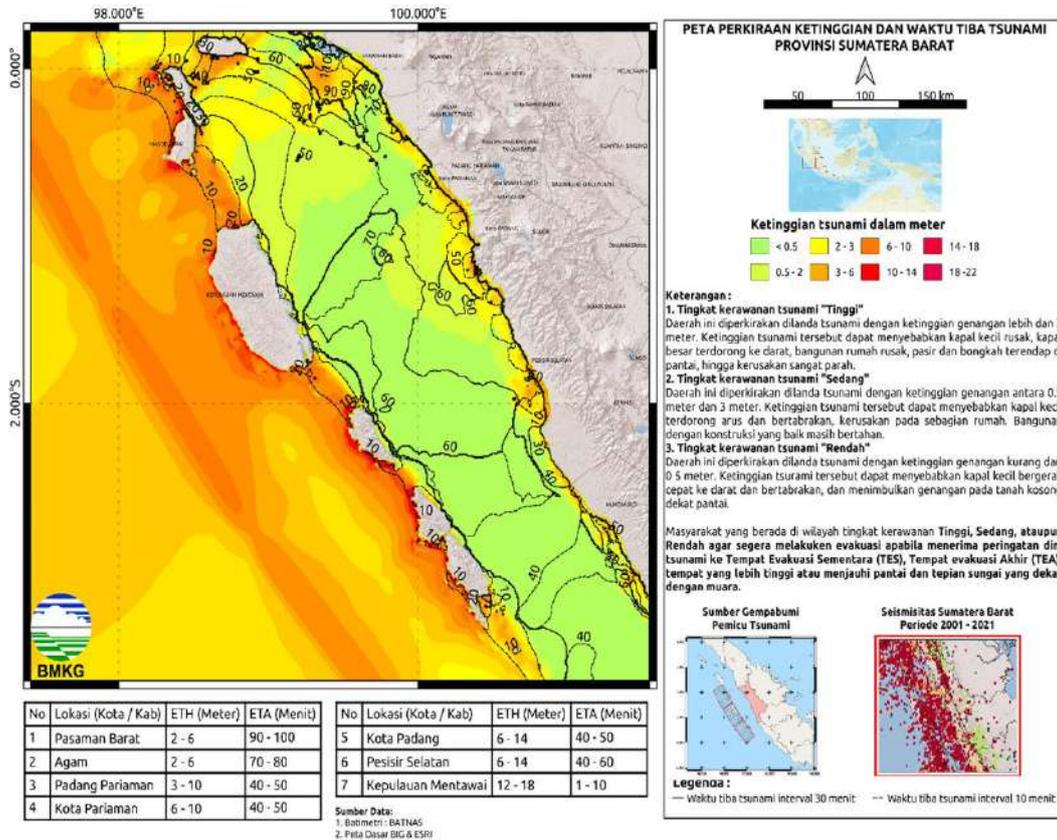
Mentawai-Siberut dan segmen Mentawai-pagai. Sepanjang tahun 416-2018 dalam catatan Katalog Tsunami BMKG wilayah Provinsi Sumatera Barat telah mengalami 15 gempa bumi yang mengakibatkan Tsunami, dengan kejadian terbesar terjadi pada 16 Februari 1861 dengan ketinggian gelombang tsunami maksimum 7m dan korban sekitar 1105 jiwa yang dirasakan hingga Pulau Jawa.



2.2. Skenario Kejadian

Ringkasan Skenario Kejadian





Waktu kejadian	Sabtu tanggal XXXXX pukul 10.00 WIB
Lokasi	Lokasi episenter gempabumi terletak pada koordinat 1.80 LS 99.60 BT dengan kedalaman 35 km
Pemicu	Gempabumi megathrust dengan magnitudo Mm 8,9
Bahaya primer	Gelombang tsunami dengan ketinggian 10-14m
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini gempabumi berpotensi tsunami dari BMKG dikeluarkan <math>< 5</math> menit setelah kejadian gempabumi
Cakupan wilayah terdampak	Kecamatan Koto XI Tarusan 1. Nagari Sungai Pinang 2. Nagari Sungai Nyalo 3. Nagari Mandeh 4. Nagari Setara Nanggalo 5. Nagari Carocok Anau Ampang Pulai

	<p>6.Nagari Pulau Karam Ampang Pulau</p> <p>7.Nagari Ampang Pulau</p> <p>8.Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau</p> <p>9.Nagari Kapuh</p> <p>10. Nagari Kapuh Utara</p> <p>11. Batu Hampar</p> <p>12. Nanggalo</p> <p>Kecamatan Bayang</p> <p>1.Nagari Api-Api Pasar Baru</p> <p>2.Nagari Pasar Baru</p> <p>3.Nagari Tanjung Durian Pasar Baru</p> <p>4.Nagari Gurun Panjang Selatan</p> <p>5.Gurun Panjang Barat</p> <p>Kecamatan IV Jurai</p> <p>1.Nagari Sago Salido</p> <p>2.Nagari Salido</p> <p>3.Nagari Painan</p> <p>4.Nagari Painan Selatan</p> <p>5.Nagari Painan Timur</p> <p>6.Nagari Bungo Pasang Salido</p> <p>Kecamatan Batang Kapas</p> <p>1.Nagari IV Koto Hilie</p> <p>2.Nagari Taluak Tigo Sakato</p> <p>3.Nagari Koto Nan Duo Ampek Koto Hilie</p> <p>4.Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie</p> <p>5.Nagari Taluak</p> <p>Kecamatan Sutera</p> <p>1. Nagari Amping Parak</p> <p>2. Nagari Amping Parak Timur</p> <p>3. Nagari Surantih</p> <p>4. Nagari Taratak</p> <p>5. Nagari Koto Taratak</p>
--	--

	<p>6. Nagari Lansano Taratak</p> <p>Kecamatan Lengayang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nagari Kambang 2.Nagari Kambang Barat. 3.Nagari Kambang Utara 4.Nagari Lakitan 5.Nagari Lakitan Timur 6.Nagari Lakitan Utara 7.Nagari Lakitan Selatan <p>Kecamatan Ranah Pesisir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nagari Pelangai 2.Nagari Nyiur Melambai Pelangai 3.Nagari Pasia Palangai 4.Nagari Sungai Tunu 5.Nagari Sungai Tunu Barat <p>Kecamatan Linggo Sari Baganti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nagari Lagan Hilir Punggasan 2.Padang XI Punggasan 3.Nagari Punggasan 4.Nagari Punggasan Timur 5.Nagari Punggasan Utara 6.Nagari Air Haji Barat 7.Nagari Air Haji Tengah 8.Muara Gadang Air Haji 9.Sungai Sirah Air Haji 10. Muara Kandis Punggasan <p>Kecamatan Pancung Soal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Indrapura Barat 2.Muaro Sakai Indrapura 3.Kudo-Kudo Indrapura
--	---

	<p>Kecamatan Airpura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulau Rajo Indrapura 2. Taluak Kualo Indrapura 3. Tanah Bakali Indrapura <p>Kecamatan Silaut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambungo 2. Air Hitam 3. Lubuk Bunta 4. Talang Binjai 5. Sungai Pulai 6. Sungai Pulai 7. Sungai Sarik
Bahaya sekunder	Longsor di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

2.3. Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

1. Kecamatan Silaut

- a. Jumlah penduduk : 12.233 jiwa
- b. Mengungsi : 11.744 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 61 orang
 - (2) Meninggal dunia : 61 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 86 orang
 - ii. Luka Sedang : 98 orang
 - iii. Luka Ringan : 183. orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang

- d. Lokasi Pengungsian :
Kantor Camat Silaut

2. Kecamatan Pancung Soal

- a. Jumlah penduduk : 8.556 jiwa
b. Mengungsi : 8.214 jiwa
c. Korban jiwa
(1) Hilang : 83 orang
(2) Meninggal dunia : 83 . orang
(3) Luka-Luka
i. Luka Berat : 60 orang
ii. Luka Sedang: 68. orang
iii. Luka Ringan : 128 . orang
(4) Pendetang terdampak
i. WNI : - orang
ii. WNA : - orang
d. Lokasi Pengungsian
Kudo-kudo, Pasar Indrapura

3. Kecamatan Airpura

- a. Jumlah penduduk : 7.930. jiwa
b. Mengungsi : 7.613 jiwa
c. Korban jiwa
(1) Hilang : 39 orang
(2) Meninggal dunia : 39 orang
(3) Luka-Luka
i. Luka Berat : 56 orang
ii. Luka Sedang: 63 orang
iii. Luka Ringan : 119 orang
(4) Pendetang terdampak
i. WNI : - orang
ii. WNA : - orang
d. Lokasi Pengungsian
Shelter Batu Rajo Pasir Ganting

4. Kecamatan Linggo Sari Baganti

- a. Jumlah penduduk : 34.817 jiwa
- b. Mengungsi : 33.424 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 173 orang
 - (2) Meninggal dunia : 173 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 244 orang
 - ii. Luka Sedang: 279 orang
 - iii. Luka Ringan : 522 orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian
Pasar Sungai Tunu, Pasar Bukit

5. Kecamatan Ranah Pesisir

- a. Jumlah penduduk : 21.453 jiwa
- b. Mengungsi : 20.595 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 107 orang
 - (2) Meninggal dunia : 107 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 150 orang
 - ii. Luka Sedang: 172 orang
 - iii. Luka Ringan : 322 orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian
Sungai Liku, Bukit Aie Batu dan Pasar Sungai Tunu

6. Kecamatan Lengayang

- a. Jumlah penduduk : 46,157 jiwa
- b. Mengungsi : 44.311 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 230 orang
 - (2) Meninggal dunia : 230 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 323 orang
 - ii. Luka Sedang : 369 orang
 - iii. Luka Ringan : 692 orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian

7. Kecamatan Sutera

- a. Jumlah penduduk : 32.876 jiwa
- b. Mengungsi : 31.561 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 164 orang
 - (2) Meninggal dunia : 164 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 230 orang
 - ii. Luka Sedang : 263 orang
 - iii. Luka Ringan : 493 orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian

Bukit Koto Taratak, Nanggalo, Embung Taratak, Kayu Gadang, Shelter SMAN 1, Shelter SMPN 4 Sutera, Shelter MIS Amping Parak, Taratak Paneh Padang Rubiah, Gunung Rajo.

8. Kecamatan Batang Kapas

- a. Jumlah penduduk : 24,663 jiwa
- b. Mengungsi : 23.676 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 123 orang
 - (2) Meninggal dunia : 123 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 173 orang
 - ii. Luka Sedang: 197 orang
 - iii. Luka Ringan : 370 orang
 - (4) Pendetang terdampak:
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian
Bukit Tambun Tulang, Bukit Labuang Baruak dan Bukit Pulai dan Bukit Taratak

9. Kecamatan IV Jurai

- a. Jumlah penduduk : 35.433 jiwa
- b. Mengungsi : 34.016 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 176 orang
 - (2) Meninggal dunia : 176 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 248 orang
 - ii. Luka Sedang: 283 orang
 - iii. Luka Ringan : 531 orang
 - (4) Pendetang terdampak
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian
Gunung Bungkok, Gurun Salido, Bukit PDAM, Langkisau, Kabun Taranak, Prumnas Timbulun dan Ex Taman Makam Pahlawan, Medan Bapaneh dan Bukit Biawak dan Bukit Patambuhan.

10. Kecamatan Bayang

- a. Jumlah penduduk : 13,454 jiwa
- b. Mengungsi : 12.916. jiwa
- c. Korban jiwa :
 - (1) Hilang : 67 orang
 - (2) Meninggal dunia : 67 orang
 - (3) Luka-Luka:
 - i. Luka Berat : 94 orang
 - ii. Luka Sedang : 108 orang
 - iii. Luka Ringan : 202 orang
 - (4) Pendetang terdampak:
 - iii. WNI : orang
 - iv. WNA : Orang
- d. Lokasi Pengungsian :
Bukit Selayang Pandang, Lereng Bukit dan Sungai Putih

11. Kecamatan Koto XI Tarusan

- a. Jumlah penduduk : 29.944 jiwa
- b. Mengungsi : 28.746 jiwa
- c. Korban jiwa
 - (1) Hilang : 149. orang
 - (2) Meninggal dunia : 149 orang
 - (3) Luka-Luka
 - i. Luka Berat : 210 orang
 - ii. Luka Sedang : 240 orang
 - iii. Luka Ringan : 449 orang
 - (4) Pendetang terdampak:
 - i. WNI : - orang
 - ii. WNA : - orang
- d. Lokasi Pengungsian
Bukit Batu Kalang, Bukit Air.

B. Aspek Fisik

1. Rumah (11 Kecamatan dan 72 Nagari)
 - Rusak berat/roboh : 42.699 Unit
 - Rusak sedang : 28.466 Unit
 - Rusak ringan : 23.722 Unit
2. Jalan
 - Jalan Kabupaten : 1854,38 km
 - Jalan Provinsi : 82 km
 - Jalan Nasional : 220 km
3. Fasilitas Pendidikan : 500
4. Fasilitas Kesehatan : 109

C. Aspek Ekonomi

Kerusakan fisik infrastruktur ekonomi mengakibatkan terganggunya atau berhentinya fungsi dan akses masyarakat dalam aspek perekonomian maupun memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk dampak langsung dalam aspek ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Terganggunya aktivitas perdagangan atau pasar
2. Terganggunya ketersediaan barang kebutuhan dasar karena pasar/toko/supermarket rusak
3. Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sembako
4. Masyarakat hanya mengandalkan sumber logistik dan bantuan yang ada
5. Berdampaknya ekonomi masyarakat akibat dari rusaknya tempat wisata ini
6. Terganggunya mata pencaharian masyarakat sekitar di daerah pariwisata (tour guide, travel agent, jasa pendidikan (bimbel, tempat kursus).
7. Hilang dan berkurangnya mata pencaharian untuk petani/kebun, nelayan dan perdagangan karena tidak dapat melaksanakan kegiatan
8. Akses transportasi dan infrastruktur jalan yang rusak/putus mengakibatkan distribusi pangan ke daerah terdampak terhambat.

D. Aspek Lingkungan

Dampak gempa diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada kondisi air, tanah/lahan, udara, hutan. Berikut skenario dampak yang ditimbulkan dari gempa yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Air. Terganggunya sistem air tanah yang mengakibatkan perubahan kuantitas dan kualitas air tanah.
2. Udara. Dampak pada kualitas udara (peningkatan debu, asap, kualitas udara menurun akibat tercemar bau dari proses pembusukan) terutama di wilayah-wilayah padat penduduk.
3. Tanah/lahan. Dampak terhadap hilangnya/terganggunya lahan untuk perkebunan, pertanian, dan permukiman.
4. Hutan dan Flora Fauna. Dampak gempa di beberapa wilayah rentan akan lebih mengurangi luasan hutan yang ada, sehingga memperparah kondisi ekosistem. Kemungkinan besar, hewan-hewan seperti monyet, babi hutan, binatang melata akan bermigrasi ke wilayah lain atau bahkan mungkin akan bermigrasi ke wilayah pengungsian.

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Kerusakan fisik sarana dan prasarana layanan publik mengakibatkan terganggunya atau berhentinya akses dan fungsi pelayanan publik, baik pemerintah maupun swasta, yaitu adalah :

1. Kantor Pemerintahan
 - Kantor/Dinas Kota : 24
 - Kantor Kecamatan : 11
 - Kantor Desa/Kel : 65
 - Instansi Vertikal : 7
2. Layanan Kesehatan:
 - Rumah Sakit Pemerintah : 1
 - Rumah Sakit Swasta : 2
 - Klinik : 105
 - Puskesmas : 21

3. Layanan Pendidikan

- Perguruan Tinggi : 5
- SMA Sederajat : 11
- SMP Sederajat : 67
- SD Sederajat : 385
- TK/Paud : 372

4. Layanan Trantib

- Polres : 1
- Polsek Terdampak : 8 dan Penyangga : 3 Polsek
- Koramil Terdampak : 5 dan Penyangga : 2 Koramil

5. Layanan Perbankan

- Bank Pemerintah/BUMN/D : 36
- Bank Swasta/BPR : -

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Komando Penanganan Darurat Bencana Gempabumi dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan operasi penanganan kedaruratan bencana Gempabumi dan Tsunami selama **14 hari** atau dapat diperpanjang sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu dengan melaksanakan prinsip, proses, dan pendekatan Aksi Kemanusiaan Inklusi Berbasis Komunitas - AKsl Baik (*people-centered inclusive humanitarian assistance - PCIHA*).

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana
2. Terlaksananya pencarian dan penyelamatan dan evakuasi bagi korban
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan BTT dan DSP).
4. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam penanganan darurat.
5. Tersedianya data sumberdaya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
6. Terorganisirnya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
7. Terkoordinasinya pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam masa kedaruratan bencana.
8. Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
9. Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
10. Terlaksananya pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.

11. Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk warga terdampak, kelompok rentan dan mencegah penularan penyakit di lokasi bencana, termasuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
12. Terlaksananya penyelamatan harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak.
13. Terselenggaranya pembersihan sampah-sampah pasca bencana.
14. Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi.
15. Tersedianya data penanganan kedaruratan untuk mendukung pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi.
16. Terlaksananya penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana Gempabumi dan Tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.1 Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah :

- 1) Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
- 2) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil.
- 4) Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana.
- 6) Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
- 7) Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
- 8) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 9) Pengelolaan tempat pengungsian.
- 10) Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- 11) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
- 12) Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.

- 13) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
- 14) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 15) Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar dan pembersihan sampah akibat bencana).
- 16) Pelaksanaan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.
- 17) Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.2 Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah :

- 1) Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
- 2) Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 3) Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan transisi darurat bencana ke pemulihan.
- 4) Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan dan penugasan personil.
- 5) Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
- 7) Pengelolaan tempat pengungsian.
- 8) Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
- 9) Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*).
- 10) Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.

- 11) Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
- 12) Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
- 13) Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
- 14) Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.
- 15) Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik).
- 16) Pelaksanaan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.
- 17) Penentuan perpanjangan atau penghentian Status Transisi Darurat ke Pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan bencana tsunami, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan 5 fungsi pokok, yaitu :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Penjabaran masing-masing fungsi pokok dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasi penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang

menginstruksikan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana gempa bumi yang terjadi, dan menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

3. Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana-rencana dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempa bumi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, serta menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan bencana.

4. Operasi

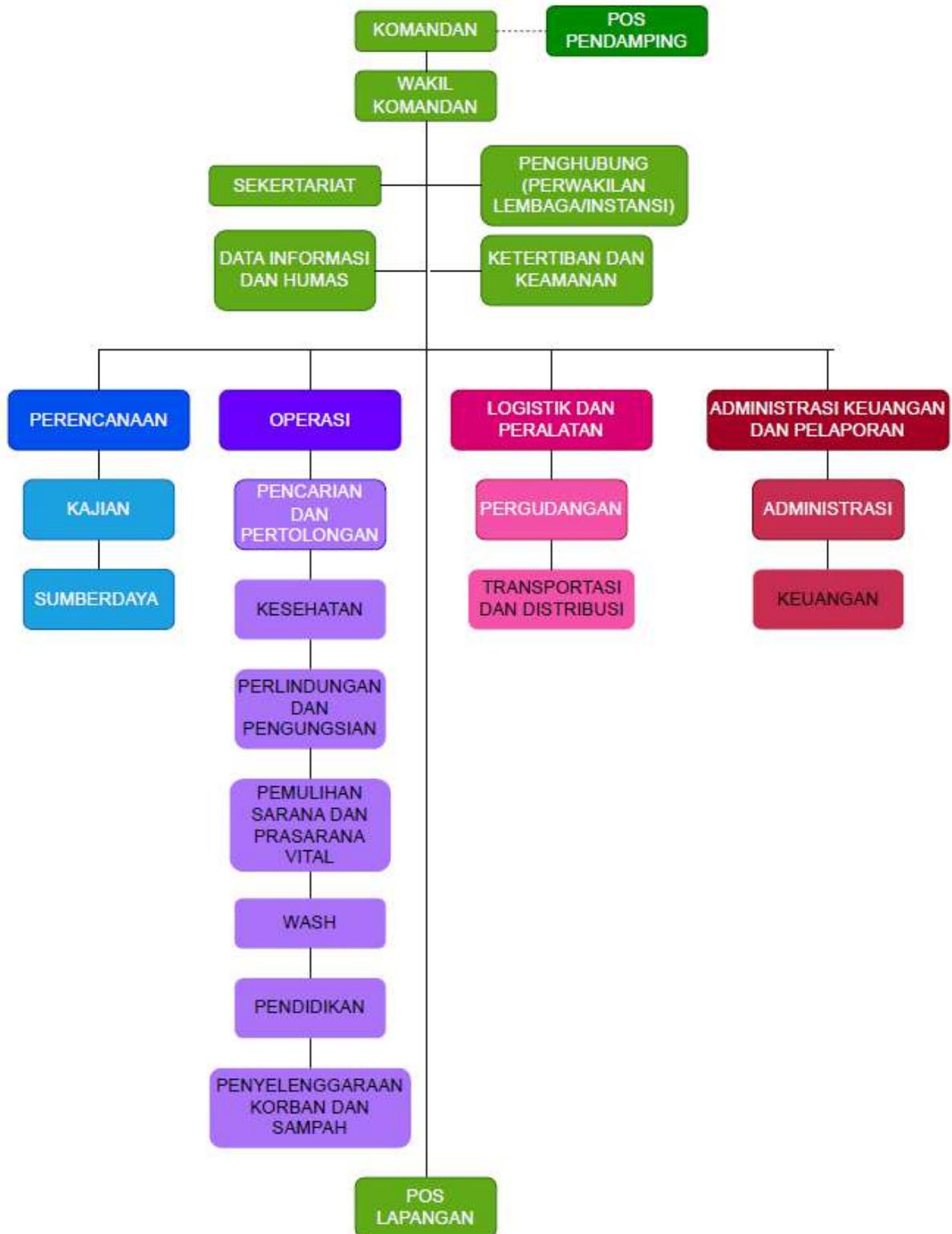
Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan bencana Gempabumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana penting dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Logistik

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana Gempabumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yang meliputi penyediaan fasilitas,

jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

4.3. Struktur Organisasi Komando



Pos Lapangan



4.4. Tugas-Tugas Bidang

Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

1. Komandan PDB

- a. Memimpin operasi penanganan kedaruratan bencana
- b. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Mengaktifkan kelengkapan pos penanganan darurat jika diperlukan, seperti Pos Lapangan, Pos Pendukung, maupun pos-pos sesuai layanan darurat.
- d. Menyusun rencana operasi sesuai status kedaruratan bencana yang dimandatkan.
- e. Menetapkan rencana tindakan operasi harian berdasarkan prioritas.
- f. Melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan kedaruratan bencana.
- g. Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- h. Mengkoordinasikan pejabat perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait dalam aksesibilitas dukungan sumberdaya operasi.

2. Wakil Komandan PDB

- a. Membantu Komandan PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando dan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Mengelola posko dengan mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, dan perwakilan instansi/lembaga.
- c. Mewakili Komandan PDB, apabila Komandan PDB berhalangan.

3. Sekretariat

- a. Mengelola dan melaksanakan tugas kesekretariatan Pos Komando (Posko).
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum Posko dan pelaporan.
- c. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil PDB.
- d. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana administratif, baik personil, kesekretariatan, pos pendukung/pendamping.
- e. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.

4. Data Informasi dan Humas

- a. Mengelola informasi dan komunikasi perkembangan penyelenggaraan penanganan darurat bencana gempa bumi
- b. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- c. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- d. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- e. Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- f. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.

5. Perwakilan Lembaga/Instansi

- a. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan aksesibilitas dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- b. Menjadi penghubung lintas OPD.
- c. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan, pemenuhan, dan pengerahan sumberdaya/aset pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibutuhkan untuk operasi penanganan darurat bencana gempabumi.
- d. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

6. Keamanan dan Ketertiban

- a. Penyusunan rencana operasi bidang keamanan dan ketertiban
- b. Melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban saat tanggap darurat
- c. Melaksanakan keamanan pendistribusian bantuan dan operasi penanganan darurat
- d. Pencegahan penyimpangan/kerusakan pada masa tanggap darurat
- e. Pengerahan personel keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebutuhan di lokasi yang ditentukan
- f. Menjaga zona bahaya agar tidak dapat diakses oleh umum sehingga tidak menambah korban jiwa

Bidang Administrasi, Keuangan dan Pelaporan

1) Unit Administrasi

- a. Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar.
- c. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang administrasi.
- d. Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang administrasi.
- e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi.

2) Unit Keuangan

- a. Mengelola anggaran operasi penanganan darurat.
- b. Mengeluarkan dana sesuai permintaan.
- c. Menerima sumbangan dana dari pihak lainnya yang tidak mengikat.
- d. Mengumpulkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- e. Membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dana.
- f. Membuat laporan keuangan dan mengarsipkan data keuangan.
- g. Menyusun laporan seluruh keuangan.

Bidang Perencanaan

1) Unit Kajian

- a. Melaksanakan pendataan akibat dan dampak bencana.
- b. Melaksanakan kegiatan pengkajian situasi terhadap seluruh wilayah terdampak dan tingkat kerusakan bangunan/infrastruktur sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana.
- c. Menyusun rencana operasi PDB berdasar rencana kontingensi yang sudah ada dengan memasukkan data dan informasi hasil kaji cepat di lapangan.
- d. Menyusun rekomendasi penetapan status kedaruratan bencana serta pengakhiran atau perpanjangan masa PDB.

2) Unit Sumber Daya

- a. Pendataan ketersediaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik
- b. Mengkoordinasikan kebutuhan sumberdaya penanganan darurat bencana
- c. Memastikan sumberdaya sesuai kebutuhan di lapangan.
- d. Membantu mengarahkan sumber daya tenaga, logistik maupun peralatan dan anggaran.

Bidang Operasi

1) Unit Pencarian dan Pertolongan

- a. Menyusun rencana operasi Pencarian dan Pertolongan.
- b. Melaksanakan briefing, debriefing pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- c. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang Pertolongan dan Pencarian.
- d. Menggerakkan sarana prasarana dan tenaga terlatih untuk .evakuasi korban.
- e. Melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban
- f. Melaksanakan pengendalian operasi Pencarian dan Pertolongan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan Operasi Pencarian dan pertolongan kepada Posko Darurat Bencana (PDB).
- h. Meminta dukungan personil pengamanan untuk kelancaran jalur evakuasi.

- i. Meminta dukungan komunikasi untuk kelancaran pengerahan peralatan, personil dan ambulans serta kesiapan rumah sakit rujukan.
- j. Menerapkan protokol kesehatan.

2) Unit Pengungsian dan Perlindungan

- a. Menyusun rencana operasi pengelolaan pengungsian dan perlindungan.
- b. Melakukan pendataan pilah terhadap jumlah dan kondisi pengungsi.
- c. Menetapkan lokasi dan mengelola pengungsian sesuai standar.
- d. Mengkoordinasikan tugas fungsi relawan untuk memaksimalkan pengelolaan pengungsian.
- e. Mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar pangan, sandang, tempat sementara bagi pengungsi.
- f. Menyelenggarakan dan mengelola dapur umum partisipatif.
- g. Memberikan layanan psiko-sosial bagi para pengungsi.
- h. Menerapkan protokol kesehatan.
- i. Selalu mensosialisasikan berbagai informasi dan pembinaan kepada para pengungsi.
- j. Pengelolaan pengungsian dan perlindungan.
- k. Pemulihan mental dan spiritual masyarakat (trauma healing).
- l. Memberikan Layanan Pemulihan Hubungan Keluarga.

3) Unit Kesehatan

- a. Menyusun rencana operasi bidang kesehatan.
- b. Menyiapkan dan menyiagakan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (Tim TRC, Tim Bantuan Kesehatan, dan Tim Informasi & Pelaporan).
- c. Menurunkan Tim Tim Reaksi Cepat (TRC) di 1 x 24 jam pertama pasca Kejadian Bencana sekaligus mendirikan Pos Kesehatan di lokasi terdampak Bencana.
- d. Menurunkan Tim Rapid Health Assessment (RHA)/Tim Kaji Cepat) setelah dapat data dan informasi dari Tim TRC.
- e. Melaksanakan pemetaan area bencana bersama Tim Rapid Health Assessment (RHA).
- f. Melakukan pendataan kebutuhan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan.

- g. Menurunkan Tim Bantuan Kesehatan (setelah didapat data dan informasi dari Tim RHA)/Tim Kaji Cepat).
- h. Menugaskan Tim *Emergency Medical Team* (EMT).
- i. Melaksanakan penyiagaan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos layanan kesehatan.
- j. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan: kesehatan dasar dan kesehatan klinis, termasuk pos layanan kesehatan darurat, termasuk kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
- k. Mendistribusikan tenaga kesehatan, obat, perbekalan kesehatan, dan pos kesehatan sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
- l. Memberikan pelayanan rujukan rumah sakit umum maupun rumahsakit khusus.
- m. Memberikan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, wisatawan domestik/mancanegara.
- n. Melaksanakan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular di lokasi pengungsian.
- o. Membuat dan menyampaikan informasi dan laporan secara periodik ke Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.

4) Unit Pendidikan

- a. Penyusunan rencana operasi bidang pendidikan.
- b. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan darurat inklusi.
- c. Melaksanakan pendataan anak usia sekolah.
- d. Pendataan kebutuhan sumber daya manusia terkait yang berkompeten.

5) Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

- a. Penyusunan rencana operasi bidang pemulihan sarana dan prasarana vital
- b. Memperbaiki sarana dan prasarana umum secara darurat
- c. Mendirikan fasilitas umum darurat

6) Unit WASH (Water, Sanitation and Hygiene)

- a. Melakukan penilaian cepat, perencanaan, desain, implementasi dan pengawasan air bersih dan sanitasi.
- b. Menyediakan dan menjamin kecukupan air bersih, sabun dan lainnya.
- c. Menyiapkan fasilitas MCK terpisah untuk pria dan wanita terpisah.
- d. Menjamin kebersihan di area pengungsi.

7) Unit Penyelenggaraan Korban dan Sampah

- a. Penyusunan rencana operasi Penyelenggaraan korban dan sampah.
- b. Menyiapkan tenaga dan peralatan untuk penyelenggaraan korban dan sampah.
- c. Melakukan pengolahan sampah.
- d. Menyediakan lahan untuk penguburan.
- e. menyediakan lahan untuk menampung sampah.

Bidang Logistik dan Peralatan

1) Unit Pergudangan

- a. Screening bantuan masuk
- b. Memastikan ketersediaan gudang yang memadai untuk menampung/menyimpan logistik
- c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian logistik
- d. Melakukan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pergudangan
- e. Pendataan Kebutuhan Pangan dan Non Pangan di Daerah terdampak
- f. Ketersediaan logistik Pangan dan Non Pangan yang akan disalurkan
- g. Manajemen Penyaluran Pangan dan Non Pangan
- h. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum beserta personilnya
- i. Penyusunan rencana operasi bidang logistik dan Peralatan
- j. Mengkoordinasikan kebutuhan logistik dan peralatan di daerah terdampak
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi logistik dan peralatan
- l. Menyusun laporan kegiatan bidang operasi logistik dan peralatan

2) Unit Transportasi dan Distribusi

- a. Penyusunan rencana operasi bidang Transportasi
- b. Melaksanakan pendataan alat transportasi yang tersedia dan dapat difungsikan
- c. Memobilisasi unit transportasi ke lokasi dampak
- d. Mendistribusikan dan menyimpan stok barang ke gudang
- e. Mendistribusikan stok barang ke pos lapangan
- f. Memberikan bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan semua bidang/unit

6. Pos Lapangan

- a. Tempat berkumpul semua sumber daya untuk melaksanakan tanggap darurat pada wilayah kerja Pos Komando Lapangan,
- b. Sebagai wadah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan upaya-upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh instansi/organisasi terkait dalam hal pencarian dan pertolongan, pengelolaan pengungsi, logistik dan distribusi, kesehatan
- c. Sebagai tempat perencanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi terdampak bencana.

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat yang diberikan oleh Otoritas dan atau Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh sistem organisasi penanganan kedaruratan bencana tsunami akibat gempa bumi di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Pengumpulan data dan informasi kejadian dan dampak langsung kejadian bencana melalui pengkajian cepat. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder meliputi :
 - Di mana : Tempat/lokasi bencana diikuti waktu dan tanggal kejadian
 - Penyebab : Fenomena alam yang memicu terjadinya bencana

- Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana maupun objek vital
 - Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan
2. Melaksanakan tindakan penanganan awal kepada masyarakat terdampak, termasuk warga negara asing, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara.
 3. Penetapan Status Kedaruratan Bencana. Bupati Pesisir Selatan menetapkan Status Kedaruratan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan (1) laporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan atas laporan dan analisa pengkajian cepat, (2) pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi, serta (3) memperhatikan dokumen Rencana Kontingensi Bahaya Gempabumi dan tsunami Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan status kedaruratan bencana dilakukan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. Pembentukan struktur organisasi dan penunjukan personil dalam SKPDB sebagai pengemban mandat dan pelaksana tugas penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan yang ditetapkan.
 6. Penyusunan dan Penetapan Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana dan pengerahan sumberdaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Pelaksanaan aksi operasi penanganan darurat bencana.
 8. Penerapan dan penegakan protokol kesehatan dalam operasi penanganan darurat.
 9. Penerapan tata kelola administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
 10. Pengamanan aset ekonomi pemerintah, swasta, dan masyarakat dari tindak penjarahan.

11. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan dalam dalam proses perencanaan, penyusunan prosedur, monitoring dan evaluasi penanganan darurat.
12. Perhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat dalam pelaksanaan tugas penanganan kedaruratan.
13. Perhatikan faktor keamanan dan keselamatan personil guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.
14. Lakukan semua kegiatan operasi penanganan darurat bencana secara inklusif dengan memperhatikan akses mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas kelompok rentan.
15. Pengorganisasian relawan dan rencana penugasan disesuaikan dengan keterampilan dan kompetensi, serta telah memenuhi syarat kesehatan.
16. Laporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya keuangan Kabupaten Pesisir Selatan, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat melalui penggunaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, pembukaan rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial, dan masyarakat umum.
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meminta dukungan dan bantuan anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat (Belanja Tidak Terduga (BTT).
3. Jika sumberdaya keuangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mencukupi dalam penanganan kedaruratan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meminta bantuan dan dukungan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat, melalui BNPB terkait Dana Siap Pakai (DSP).
4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat meminta bantuan dan dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan, baik DSP, Belanja Tidak Terduga (BTT), pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang apabila tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Sumatera Barat.
5. Proses Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) adalah :
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Laporan kejadian bencana.
 - 2) Pernyataan Tanggap Darurat dari Bupati Pesisir Selatan.
 - 3) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 4) Penetapan SK Struktur Komando Penanganan Darurat.
 - 5) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.

- 6) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - 7) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 8) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai :
- 1) Laporan kejadian bencana.
 - 2) Pernyataan Tanggap Darurat dari Bupati Pesisir Selatan
 - 3) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 4) Penetapan SK Struktur Komando Penanganan Darurat.
 - 5) Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
 - 6) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
 - 7) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 8) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
 - 9) Kepala BPBD Kabupaten Pesisir Selatan berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

6. Jenis dan sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Gempabumi dan Tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
4	Swasta	Donasi tidak mengikat
5	Organisasi Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Lembaga Pendidikan	Donasi tidak mengikat
7	Masyarakat	Donasi tidak mengikat

5.2. Logistik

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat.
2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.
4. Jika sumberdaya Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

BAB VI PENGENDALIAN

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana tsunami akibat gempa bumi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengendalian pelaksanaan penanganan darurat bencana Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali pelaksanaan penanganan kedaruratan.

Komandan Penanganan Darurat Bencana ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan diberikan kewenangan untuk memimpin pelaksanaan penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi di Kabupaten Pesisir Selatan.

6.1. Komando

Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Daerah dengan menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Komandan Operasi dan Kepala Pelaksana BPBD sebagai Wakil Komandan memiliki mandat, tugas, dan kewenangan untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak dan menggerakkan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan darurat bencana secara bersama-sama dalam pelayanan sesuai masing-masing tugas dan fungsinya.

a. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko, berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Gudang logistik, (kompleks Shelter) Iliyas Yakub Jl Nusantara Painan.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB Kabupaten Pesisir Selatan, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana. Pos lapangan

didirikan untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan kebutuhan penyintas. Pos Lapangan PDB Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di :

Kecamatan	Lokasi Pos Lapangan	Koordinat
Koto XI Tarusan	Kantor Camat Koto XI Tarusan	-1.244050° LS 100.478141° BT
Bayang	Pasar Koto Berapak	-1.241083° LS 100.534260° BT
IV Nagari Bayang Utara	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	-1.204659° LS 100.573728°
IV Jurai	Bukit PDAM	-1.340454° LS 100.585713° BT
Batang Kapas	SMPN 2 Batang Kapas	-1.428183° LS -1.428183° BT
Sutera	Lapangan Puskesmas Kayu Gadang	-1.538031° LS 100.689652° BT
Lengayang	Pasar Koto Baru	-1.670541° LS 100.757162° BT
Ranah Pesisir	Kantor Camat Ranah Pesisir	-1.796080° LS 100.837515° BT
Linggo Sari Baganti	Pasar Lagan	-1.867965° LS 100.853124° BT
Airpura	Kantor Camat Airpura	-2.026588° LS 100.944778° BT
Pancung Soal	Kantor Camat Pancung Soal	-2.055462° LS 100.962202° BT
Basa Ampek Balai Tapan	Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	-2.166315° LS 101.070662° BT
Ranah Ampek Hulu Tapan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	-2.151540° LS 101.099879° BT
Lunang	Kantor Camat Lunang	-2.275289° LS 101.144087° BT
Silaut	Kantor Camat Silaut	-2.355213° LS 101.141943° BT

c. Pos Pendukung

Untuk memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar daerah, dibentuk dan didirikan Pos Pendukung PDB Kabupaten Pesisir Selatan. Pos Pendukung PDB berkedudukan di :

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	Jarak ke Posko
Pos Pendukung 1	Kantor Bupati Solok	-0.949372° LS 100.613109° BT	100km
Pos Pendukung 2	Balai Kota Sungai Penuh	-2.070868° 101.396075°	64km
Pos Pendukung 3			
Pos Pendukung 4			
Pos Pendukung 5			
Pos Pendukung 6			

d. Pos Pendamping Provinsi

Pos Pendamping Provinsi merupakan pos yang didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat berfungsi untuk mendampingi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan kedaruratan bencana. **Pospenprov** berkedudukan di Gudang logistik, (kompleks Shelter) Iliyas Yakub Jl Nusantara Painan.

e. Pos Pendamping Nasional

Pos Pendamping Nasional atau Pospenas merupakan pos yang didirikan dan dikelola oleh BNPB, berfungsi untuk mendampingi SKPDB Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan kedaruratan bencana. Pospenas berkedudukan di Gudang logistik, (kompleks Shelter) Iliyas Yakub Jl Nusantara Painan.

6.2. Kendali

Komandan PDB Kabupaten Pesisir Selatan berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kabupaten Pesisir Selatan terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Seluruh komponen operasi penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi Kabupaten Pesisir Selatan wajib berkoordinasi; baik di dalam maupun di luar SKPDB.

Seluruh komponen operasi penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi Kabupaten Pesisir Selatan berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar SKPDB Kabupaten Pesisir Selatan secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib. Koordinasi dipimpin oleh Komandan dan dilaksanakan minimal 2 kali sehari atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama masa kedaruratan pada waktu yang ditetapkan. Dilaksanakan di Pos Komando / Posko, koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

Jenis koordinasi

1. Koordinasi internal masing-masing bidang yang dilakukan setiap hari pada pukul 18.30 WIB
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari pada pukul 20.30 WIB di Posko

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando penanganan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi

untuk mendukung efektivitas operasi darurat dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh bidang pemangku tugas pengelolaan data, informasi, dan komunikasi.

Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a. Pos Komando

1. Telepon : 117

2. Telepon genggam/HP/Whatsapp :

3. Radio

(1) Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi Radio HF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 11.473,5 MHz. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.

(2) Frekuensi Radio VHF

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukkan BNPB dan BPBD.

(3) Frekuensi Pusdalops Provinsi Sumatera Barat 169.525 MHz dan 169.775 MHz.

(4) Frekuensi Cadangan : 143.320 MHz (RAPI)

(5) Frekuensi Cadangan : 145.150 MHz (ORARI)

(6) TNI/Polri Menggunakan Frekuensi tersendiri

(7) Frekuensi Cadangan : 140.140 MHz (Dinkes)

4. Faksimile :

5. Email : bpbdpessel84@gmail.com

6. Website : <https://www.pesisirselatankab.go.id/>

b. Pos Lapangan

1. Telepon genggam/HP/Whatsapp

2. Radio :

(1) 143.320 MHz (RAPI)

(2) 145.150 MHz (ORARI)

(3) 140.140 MHz (Dinkes)

6.5. Informasi

Data dan informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat Nagari dan Kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan serta mekanisme informasi yang keluar dari posko melalui Bagian Data Informasi dan Humas.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, komitmen para pihak dalam rencana kontingensi ini perlu dilengkapi dengan penandatanganan lembar komitmen dan disahkan oleh Bupati Pesisir Selatan.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi. Ketentuan simulasi yakni :

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan Uji Pengetahuan / Geladi Meja / *Table Top Exercise (TTX)*

Kegiatan ini merupakan latihan dalam bentuk diskusi pada level pengambil keputusan dari tiap-tiap instansi yang berfungsi membahas kasus atau permasalahan dalam operasi penanganan bencana berdasarkan *Skenario Latihan* guna meningkatkan pemahaman tentang SOP, buku petunjuk, serta tugas & tanggung jawab masing-masing bidang. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko / Geladi Posko / *Command Post Exercise (CPX)*

CPX adalah sebuah latihan yang dilaksanakan terhadap satu atau lebih instansi/organisasi, yang bertujuan untuk menguji fungsi dan kapasitas instansi yang ikut serta, yang dilaksanakan berdasarkan skenario dari rencana kontingensi. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi.

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang / *Field Training Exercise (FTX)*

FTX adalah Gladi Lapang yang dilaksanakan untuk menguji pengetahuan tentang latihan yang telah didapat pada tahap sebelumnya, dengan menggunakan asumsi situasi bencana tertentu. Hasil pengujian ini digunakan untuk evaluasi dengan melibatkan sumberdaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi**

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (*tulis informasi dari Informasi Bencana*)
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi dampak

Dampak Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk Terdampak	Mengungsi Selamat	Hilang	Meninggal	Luka Berat	Luka Sedang	Luka ringan
Silaut	12,233	11744	61	61	86	98	183
Pancung Soal	8,556	8,214	43	43	60	68	128
Airpura	7,930	7613	39	39	56	63	119
Linggo Sari Baganti	34,817	33424	173	173	244	279	522
Ranah Pesisir	21,453	20595	107	107	150	172	322
Lengayang	46,157	44311	230	230	323	369	692
Sutera	32,876	31561	164	164	230	263	493
Batang Kapas	24,663	23676	123	123	173	197	370
IV Jurai	35,433	34016	176	176	248	283	531
Bayang	13,454	12916	67	67	94	108	202
Koto XI Tarusan	29,944	28746	149	149	210	240	449
Jumlah	267,516	256815	1332	1332	1873	2140	4013

Sumber: Dukcapil 2023 dan FGD Workshop Draft 0 Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan 2023

Dampak Ekonomi

No	Ekonomi	Tingkat Kerusakan	Jumlah	
1	Perikanan laut			
		Kapal		
		Rusak Berat /Hilang	1972	
			Rusak Sedang	986
			Rusak Ringan	986
	Alat Tangkap			
			Rusak Berat /Hilang	1661
			Rusak Sedang	554
			Rusak Ringan	554
2	Perikanan Darat			
			Rusak Berat /Hilang	449
			Rusak Sedang	337
			Rusak Ringan	337
	3	Peternakan		
			Sapi	
				Rusak Berat /Hilang
				Rusak Sedang
				Rusak Ringan
Kambing				
			Rusak Berat /Hilang	3480
			Rusak Sedang	1450
			Rusak Ringan	870
Kerbau				
		Rusak Berat /Hilang	1852	
		Rusak Sedang	265	
			Rusak Ringan	529
	Unggas			
			Rusak Berat /Hilang	195594
			Rusak Sedang	27942
			Rusak Ringan	55884
	4	Lembaga Keuangan		
Bank				
			Rusak Berat /Hilang	28
				Rusak Sedang
			Rusak Ringan	11
Koperasi				
			Rusak Berat /Hilang	35
			Rusak Sedang	8
			Rusak Ringan	11
5	Usaha Perdagangan			
	Pasar			

		Rusak Berat /Hilang	35
		Rusak Sedang	5
		Rusak Ringan	14
	Restoran/warung/kedai makan		
		Rusak Berat /Hilang	1580
		Rusak Sedang	395
		Rusak Ringan	658
	Toko/Swalayan		
		Rusak Berat /Hilang	1219
		Rusak Sedang	174
		Rusak Ringan	348
6	Usaha industri		
		Rusak Berat /Hilang	3058
		Rusak Sedang	180
		Rusak Ringan	360
7	Pariwisata		
	Penginapan		
		Rusak Berat /Hilang	23
		Rusak Sedang	8
		Rusak Ringan	8
	Agen Wisata		
		Rusak Berat /Hilang	24
		Rusak Sedang	5
		Rusak Ringan	5
	Toko Souvenir		
		Rusak Berat /Hilang	42
		Rusak Sedang	5
		Rusak Ringan	5
	Transportasi Wisata		
		Rusak Berat /Hilang	184
		Rusak Sedang	23
		Rusak Ringan	23

Sumber: FGD Workshop Draft 0 Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan 2023

Dampak Lingkungan

No	Lingkun- gan	Tingkat Kerusa- kan	Kec. Tarusan	Kec. Bayang	Kec.IV Jurai	Kec. batang kapas	Kec. Sutera	Kec. Lengga- yang	Kec.Ran- ah Pesisir	Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Air Pura	Kec.Pan- cung Soal	Kec. Silaut
1	Sumber Daya Air												
	Sungai	Rusak Berat /Hilang	Batang Lundang 35 Km	Batang Bayang Sani 15 Km	Batang Lumpo 47,5 Km	Batang Jalamu 85 Km, Batang Koto Gunuan g 85 km	Batang Surantia h 171 Km, Batang Amping Parak 85 Km	Batang Lakitan 70 km	Batang Pelangai Gadang 27,25 Km	Batang Air Haji 62,9 Km	Batang Bantaian 46,6 Km		
		Rusak Sedang	Batang Tarusan 30 Km	Batang Bayang Bungo 12 Km	Batang Salido 29 Km	Batang Taratak Tampati ah 71 Km		Batang Kamban- g 59 Km	Batang Pelangai Kecil 25,2 Km	Batang Punggas- an 58,3		Batang Indrapur- a 174,4 Km	Batang Silaut 200 Km
		Rusak Ringan	Batang Siguntur 25 Km		Batang Painan 13 Km			Batang Lenggay- ang 48 Km	Batang Pelangai 12 Km				
		Sumur											
		Rusak Berat		16.172	13.235	16.119	11.432	17. 138	19.532	7000	15.021	5.623	7.523

No	Lingkungan	Tingkat Kerusakan	Kec. Tarusan	Kec. Bayang	Kec.IV Jurai	Kec. batang kapas	Kec. Sutera	Kec. Lenggayang	Kec.Ranah Pesisir	Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Air Pura	Kec.Pancung Soal	Kec. Silaut
		/Hilang											
		Rusak Sedang	109	315	90	203	86	132	3.021	720	102	202	116
		Rusak Ringan	8	135		31	13	16	1.119	160	13	35	31
2	Tanah												
	Sawah												
		Rusak Berat /Hilang	3.420 Hektar	6356,40 Hektar	4102,11 Hektar	4857 Hektar	6756,28 Hektar	10209,25 Hektar	8209,45 Hektar	8825,70 Hektar	4712,25 Hektar	4500,20 Hektar	10 Hektar
		Rusak Sedang	102 Hektar	202 Hektar	39 Hektar	60 Hektar	203 Hektar	40 Hektar	42 Hektar	50 Hektar	30 Hektar	20 Hektar	4 Hektar
		Rusak Ringan	37 Hektar	36,19 Hektar	6,09 hektar	9 Hektar	38,32 Hektar	2,25 Hektar	9,45 Hektar	10,1 Hektar	7,25 Hektar	9,2 Hektar	
		Ladang											
		Rusak Berat /Hilang	60 Hektar	18 Hektar	50 Hektar	15 Hektar	1000 Hektar	3800 Hektar	1900 Hektar	2700 Hektar	5000 Hektar	505 Hektar	8507 Hektar

No	Lingkun gan	Tingkat Kerusa kan	Kec. Tarusan	Kec. Bayang	Kec.IV Jurai	Kec. batang kapas	Kec. Sutera	Kec. Lengga yang	Kec.Ran ah Pesisir	Kec. Linggo Sari Baganti	Kec. Air Pura	Kec.Pan cung Soal	Kec. Silaut
		Rusak Sedang	8 Hektar	2 Hektar	10 Hektar	2 Hektar	200 Hektar	30 Hektar	80 Hektar	100 Hektar	600 Hektar	50 Hektar	40 Hektar
		Rusak Ringan	2 Hektar	2 Hektar	1 Hektar	2 Hektar	8 Hektar	2 Hektar	8 Hektar	46 Hektar	27 Hektar	40 Hektar	40 Hektar
	Mangrov e												
		Rusak Berat /Hilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rusak Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rusak Ringan	329,04 Ha	19,66 Ha	-	109,591 Ha	84,75 Ha	83,81 Ha	11,142 Ha	51,627 Ha	68,428 Ha	-	-

Sumber: FGD Workshop Draft 0 Renkon Gempa dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan 2023

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat		Sekda
	Wakil Komandan		Kalaksa BPBD
2	Sekretariat	Pemimpin (Lead)	Sekretariat BPBD
		Pendukung	Sekretariat Daerah
3	Data, Informasi dan Humas	Pemimpin (Lead)	Dinas Kominfo
		Pendukung	Bagian Humas Sekretariat Daerah, TNI, Polri, Dinkes, Dinsos, RAPI, ORARI, Media, PMI, BPBD
4	Penghubung (Perwakilan Lembaga/Instansi)	Pemimpin (Lead)	Sekretariat Daerah
		Pendukung	Seluruh OPD
5	Ketertiban dan Keamanan	Pemimpin (Lead)	Polri
		Pendukung	Satpol PP&Damkar, TNI, Dishub,
6	Bidang Administrasi dan Keuangan	Koordinator	BPKPAD
	Unit Administrasi	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	Dinas Sosial Perguruan Tinggi
	Unit Keuangan	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	BPKPAD
	7	Bidang Perencanaan	Koordinator
Unit Kajian	Pemimpin (Lead)	BPBD	
	Pendukung	TNI Seluruh OPD POLRI PMI Media Organisasi Profesi	
Unit Sumber Daya	Pemimpin (Lead)	BPBD	
	Pendukung	TNI POLRI	

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
			Seluruh OPD Media PMI RAPI Perguruan Tinggi Lembaga Kebencanaan Lainnya
8	Bidang Operasi	Koordinator	TNI
	Unit Pencarian dan Pertolongan	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	TNI Polri SatPolPP&Damkar PMI Dinkes Kelompok Relawan Dinsos Basarnas
	Unit Pengungsian dan Perlindungan	Pemimpin (Lead)	Dinsos
		Pendukung	BPBD Dinkes PMI Kelompok Relawan TNI Polri Perkimtan LH
	Unit Kesehatan	Pemimpin (Lead)	Dinkes
		Pendukung	TNI Polri PMI RSUD dr M Zein RS BKM RSUD Tapan

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
			RS Permata Hati
	Unit Pendidikan	Pemimpin (Lead)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendukung	STAI Painan Sago STAI Balai Selasa Dinsos Kemenag UNP STAI MA Bayang BPBD Dinkes
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin (Lead)	PUTR
		Pendukung	PERKIMTAN LH PDAM PLN Telkom TNI Polri PT UHA PT Nicko Putra Utama
	Unit WASH	Pemimpin (Lead)	PUTR
		Pendukung	PDAM Dinkes PERKIMTAN LH BPBD PMI Dinsos SatPolIPP&Damkar Puskesmas Penyangga
	Unit Penyelenggaraan Korban dan Sampah	Pemimpin (Lead)	Polri
		Pendukung	Relawan Dinkes

No	Fungsi/Sub Bagian/Unit		Organisasi
			PERKIMTAN LH SatPolPP&Damkar BPBD Kemenag Dinas Pertanian PUTR TNI PT UHA PT Nicko Putra Utama
9	Bidang Logistik	Koordinator	BPBD
	Unit Pergudangan	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	Dinas Sosial Dinas Kesehatan PMI Bulog Dinas Perikanan dan Pangan
	Unit Transportasi dan Distribusi	Pemimpin (Lead)	Dinas Perhubungan
		Pendukung	POLRI TNI RAPI PMI Dinas Sosial PUTR BPBD

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

No	Organisasi/Institusi	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	TVRI Sumatera Barat	Peliputan/Kegiatan Jurnalistik TV	1	Painan	081363016568	Kontributor
2	PMI Kabupaten Pessel	Spesialisasi Pertolongan Pertama	5	Kabupaten Pesisir Selatan	082284137665	Bidang Pelayanan
		Spesialisasi DU	4	Kabupaten Pesisir Selatan		
		Spesialisasi Hunia	20	Kabupaten Pesisir Selatan		
		Sibat	160	Kabupaten Pesisir Selatan		
		KSR	20	Kabupaten Pesisir Selatan		
		SATGAN	30	Kabupaten Pesisir Selatan		
		Humas	2	Kabupaten Pesisir Selatan		
		Promkes	10	Kabupaten Pesisir Selatan		
		WATSAN	3	Kabupaten Pesisir Selatan		
3	PDAM Tirta Langkisau	Suplay air bersih	8	Painan	085265855358	Kordinator
4	KODIM 0311/PESSEL	OMP [OPERASI MILITER UTK] dan OMSP (OPERASI MILITER SELAIN PERANG)	517	Painan	082268597299	

5	Nagari Taratak	Operator Komputer	11	Taratak	082382229965	KOORDINATOR NAGARI
6	Dinas Dukcapil	Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan dan di bantu UKL Kecamatan dalam penerbitan Dokumen Kependudukan	120	Kab. Pesisir Selatan	085311031981	HP. Fungsional Analis Kebijakan
7	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan (Klaster Kesehatan) terdiri dari: Dokter Spesialist, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Apoteker, Epidemilog, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan.	1129	Di Kantor Dinkes, di 21 Puskesmas, di 3 RSU.	085324309098/ 082388071500	No. HP Kepala Bidang dan No. HP Analis Penanggulangan Krisis Kesehatan
8	RAPI PESSSEL					
9	Bapedalitbang					
10	Polres Pesisir Selatan		580	Polres Pesisir Selatan	85263248123	Kasubag Binops Polres Pesisir Selatan
11	Dinas PUTR					
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanganan Bencana	57	di 5 Posko Kecamatan	081266673551	Danpos Tim Reaksi Cepat
13	Dinas Sosial, PPrPA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	48	Kab. Pesisir Selatan	081363175181	HP. Kabid. Linjamsos dan PFM
14	Kantor Camat Koto XI Tarusan	OPERator Komputer, Rohaniawan	30	Kantor Camat Koto XI Tarusan	08126741930	Kasi Trantib Kecamatan
15	Sekolah Tinggi Agama Islam Painan					
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator Komputer, Tenaga Pengajar dan Rohaniawan	30	Sekolah Sekolah	082183794001	No HP Kabid Budaya
17	Dinas Perkimtan LH	Verifikasi Rumah yang Kena Dampak Bencana Alam	2	Painan	081267007474	JFT. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
18	Dinas Kominfo	TIK		Painan		Website pesisirselatankab.go.id
19	BPKPAD	Pengelolaan Keuangan	3	Kantor BPKPAD		bpkpadkabpessel@gmail.com
20	PLN					
21	Bagian Hukum Sekretariat Daerah					

Sumber Daya Peralatan

No	Organisasi/Institusi	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	TVRI Sumatera Barat						
2	PMI KABUPATEN PESISIR SELATAN	TENDA PLETON	1	BAIK	KODIM Painan		
		Ambulan	1	Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan	082284137665	Bidang Pelayanan
		Sepeda Motor	1	Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan		
		Fil Bed	40	Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan		
		Tenda Sanderby	1	Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan		
		Peralatan DU	1	Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan		
		Tandu Spinal	1	Kurang Baik	Markas PMI Kabupaten Pesisir Selatan		
		Tenda, Toa, Speaker	2,2,2001	Baik	Sago	82171998556	Sekjur

		Kendaraan Dinas Roda Dua (1 unit), Gergaji(2 bh), Golok(2 bh)	5	Baik	Nagari Taratak	082382229965	-
3	PDAM Tirta Langkisau						
4	KODIM 0311/PESSEL	BUS	1	BAIK	KODIM Painan	82268597299	
		Pick Up Roda 4	4	Baik			
5	NAGARI TARATAK	Kendaraan Roda Dua	1	Baik	Kantor Wali Nagari		
6	Dinas Dukcapil						
7	Dinas Kesehatan	-	0	-	Dinas Kesehatan	085324309098	
8	RAPI PESSEL						
9	Bapedalitbang						
10	Polres Pesisir Selatan	Tenda ukuran 4 x 10	3	Baik	Polres Pesisir Selatan		
		Mobil Tangki (Water Cannon)	2	Baik	Painan	081378250400	
		Laptop, Kamera, Tripod, Monopod, Motor,	1	Baik	Bayang	081363016568	
		Mobil Rescue (1 Unit),Truck (1 Unit),Motor Trabas (2	6	Baik	Painan	081363175181	Kabid. Linjamsos & PFM

		Unit),Kapal Dunluph (1 Unit), Dapur Umum (1 Unit)					
		Mobil Pick Up Roda 4 (7 unit)	7	Baik	Painan		
		Motor Trabas (2 unit), dapur umum (1 unit), tenda keluarga(2 unit), kapal dolphin(1 unit)	6	Baik	Painan, Salido, Koto XI Tarusan		
		Kendaraan Roda empat, di UKL Kecamatan	1	Baik	Polres Pesisir Selatan	85263248123	
		HT	150	Baik	Polres Pesisir Selatan	85263248123	
		Ambulance	1	Baik	Painan		
		Chainsaw	12	Baik	Polres dan Polsek	85263248123	
11	Dinas PUTR						
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	KOMPOR BIOMASSA	12	Baik	Gudang Logistik BPBD		
		GINSET	3	Baik	Gudang Logistik BPBD		
		BAK AIR	1	Baik	Gudang Logistik BPBD		
		POMPA APUNG	5	Baik	Bidang KL BPBD		
		Excavator	1	Baik	Bidang KL BPBD		
		Minibus 4 Roda	3	Baik	Kantor BPBD Painan		

		Pic Up	2	Baik	Bidang KL BPBD		
		Mobil Dapur Lapangan	1	Baik	Bidang KL BPBD		
		Mobil Tangki Air	1	Baik	Bidang KL BPBD		
		Chainsaw	6	Baik	Bidang KL BPBD		
		Mobil Rescue	2	Baik	Bidang KL BPBD		
13	Dinas Sosial PPr, PA						
14	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Kendaraan Roda Empat (1 Unit), Roda Dua (1 Unit), Genset (1 Unit)		Baik	Kantor Camat Koto XI Tarusan		
15	Sekolah Tinggi Agama Islam Painan						
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
17	Dinas Perkimtan LH	Mobil (1 unit), kendaraan roda dua(1 unit)	1	Baik	Painan	081267007474	Aset Perkimtan LH
18	Dinas Kominfo	Mobil Penerangan	1	Baik	Painan		
19	BPKPAD	Laptop	1	Baik	Kantor BPKPAD	-	-
20	PLN						
21	Bagian Hukum Sekretariat Daerah						

Sumber Daya Logistik

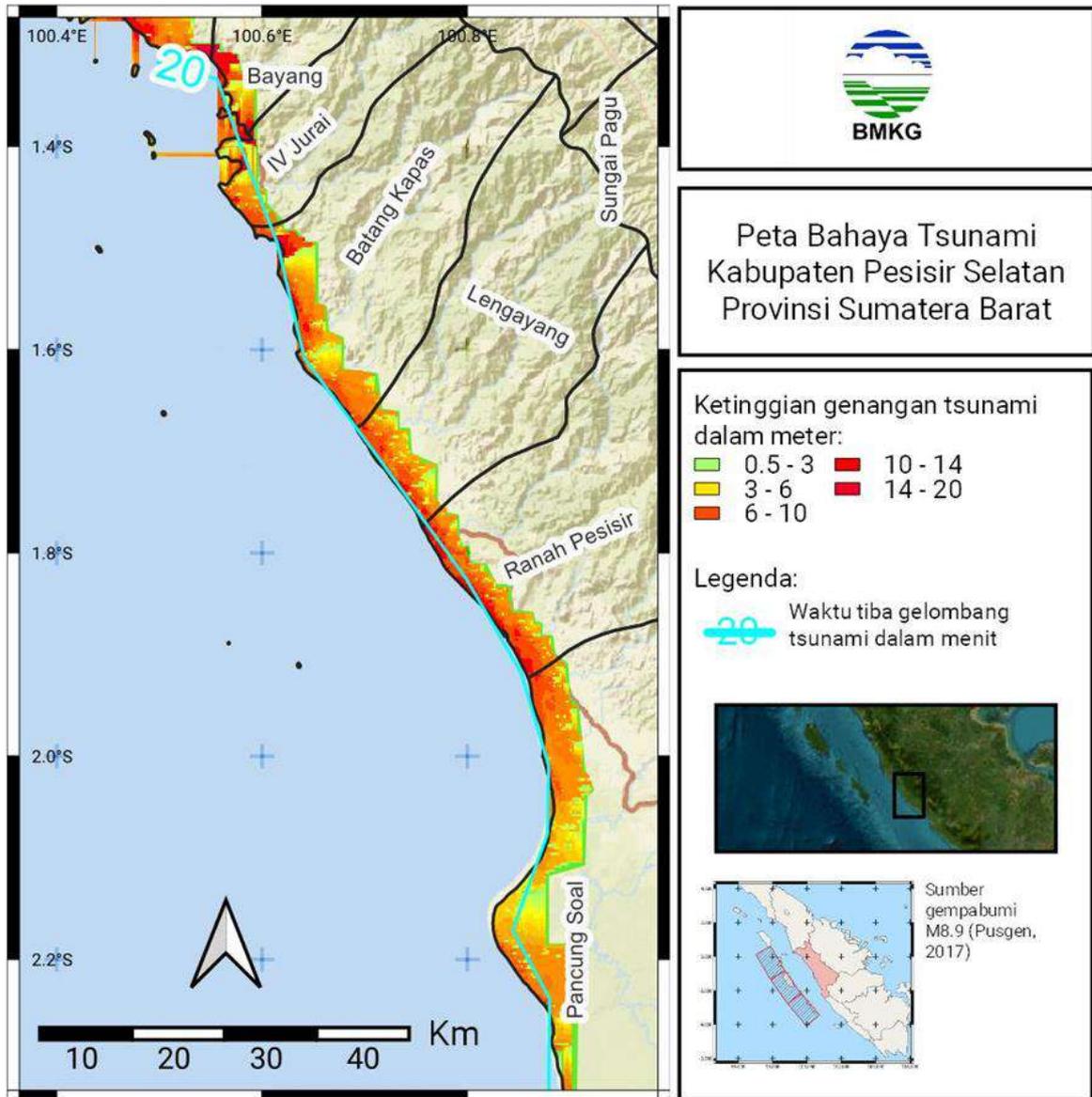
No.	Organisasi/Institusi	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	TVRI Sumatera Barat	-	-	-	-		
2	PMI Kabupaten Pesisir Selatan	Tenda Keluarga	10	Baik	Markas PMI	082284137665	Bidang Pelayanan
		Terpal	20	Baik	Markas PMI		
		Pamili Kit	10	Baik	Markas PMI		
		Baskom	10	Baik	Markas PMI		
		Piring Plastik	50	Baik	Markas PMI		
		Cangkir Plastik	50	Baik	Markas PMI		
3	PDAM Tirta Langkisau	-	-	-	-		
4	KODIM 0311/PESSEL	-	-	-	-		
5	NAGARI TARATAK	-	-	-	-		
6	Dinas Dukcapil					85263248123	
7	Dinas Kesehatan	Logistik Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Kebutuhan	1 Paket	Baik	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Medan Bapaneh	085324309098	
8	RAPI PESSEL						
9	Bappeda Litbang	-	-	-	-		
10	Polres Pesisir Selatan						
11	Dinas PUTR						
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
		PAKET REKREASIONAL	16	Baik	Gudang		

				Logistik BPBD		
	SELIMUT ANAK	8	Baik	Gudang Logistik BPBD	-	-
	SELIMUT	36	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	TENDA KELUARGA	30	Baik	Gudang Logistik BPBD	-	-
	TENDA KELUARGA	4	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	TERPAL	4	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	KARPET ERKLIM	10	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	MATRAS	11	Baik	Gudang Logistik BPBD	82171998556	
	BAJU KAOS	70	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	BAJU SERAGAM SD	168	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	KELAMBU NYAMUK	90	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	TAS ANAK SEKOLAH	10	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	KIDS WARE	6	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	KAIN SARUNG	70	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	PERALATAN RUMAH TANGGA	2	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	JERIGEN	90	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	WADAH NASI	8	Baik	Gudang Logistik BPBD		
	TEMPAT NASI CAMBUNG	8	Baik	Gudang Logistik BPBD		

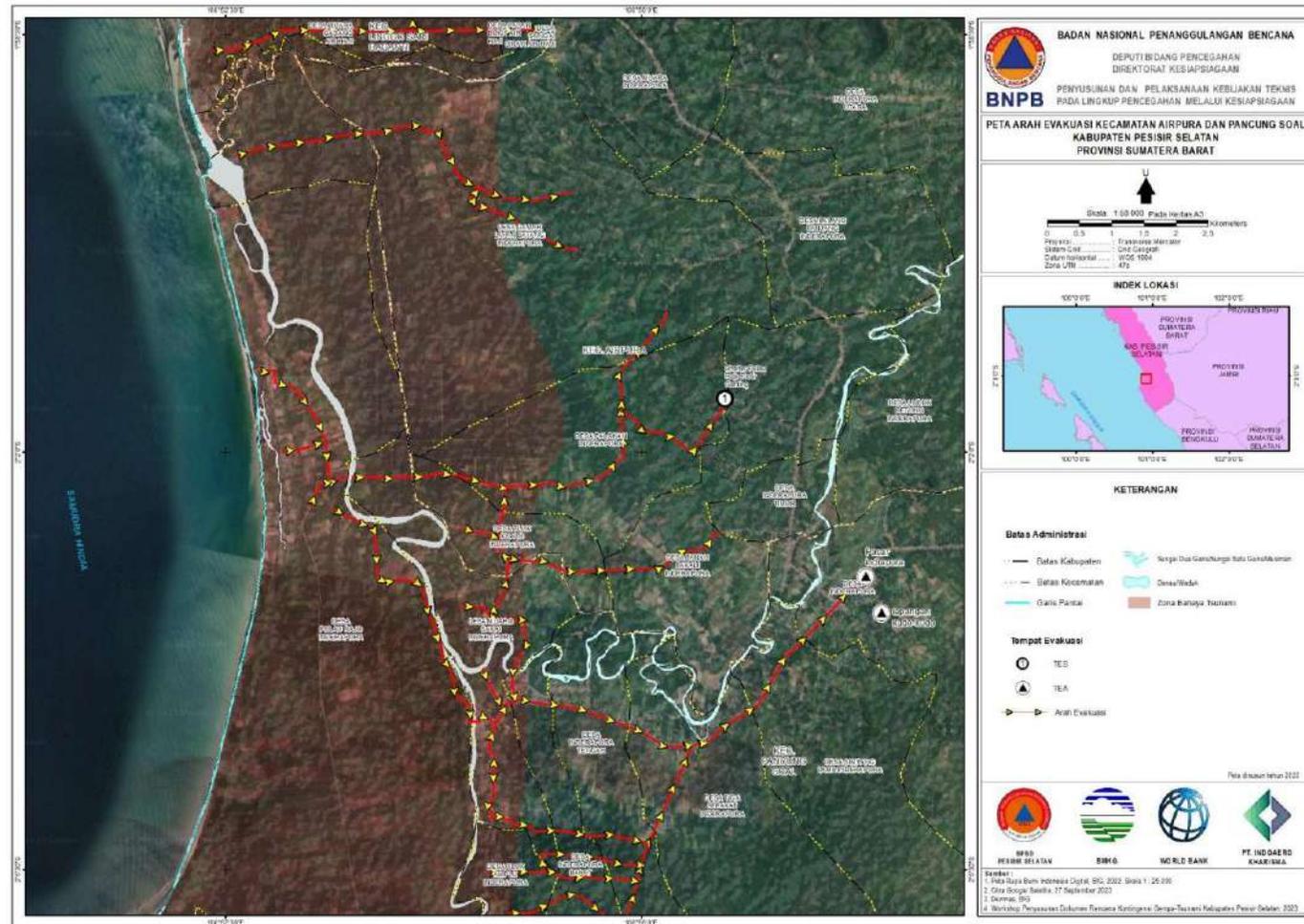
		HIGIENIS KITS UNICEF	35	Baik	Gudang Logistik BPBD		
		PAKET KESEHATAN KELUARGA	23	Baik	Gudang Logistik BPBD		
13	Dinas Sosial, PPrPA						
14	Kantor Camat Koto XI Tarusan						
15	Sekolah Tinggi Agama Islam Painan						
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
17	Dinas Perkimtan LH						
18	Dinas Kominfo						
19	BPKPAD						
20	PLN						
21	Bagian Hukum Sekretariat Daerah						

Lampiran 6. Album Peta

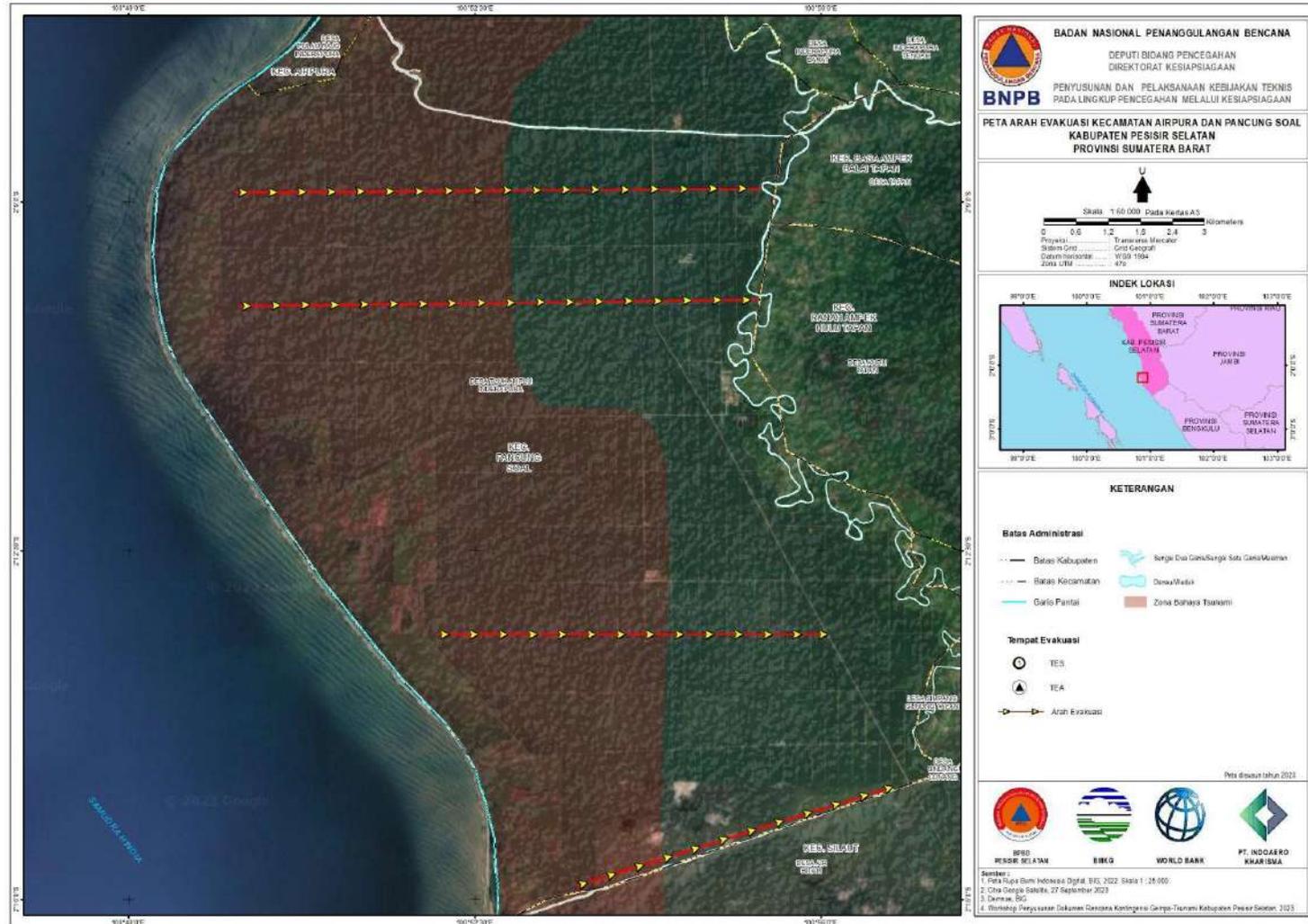
1. Peta Bahaya

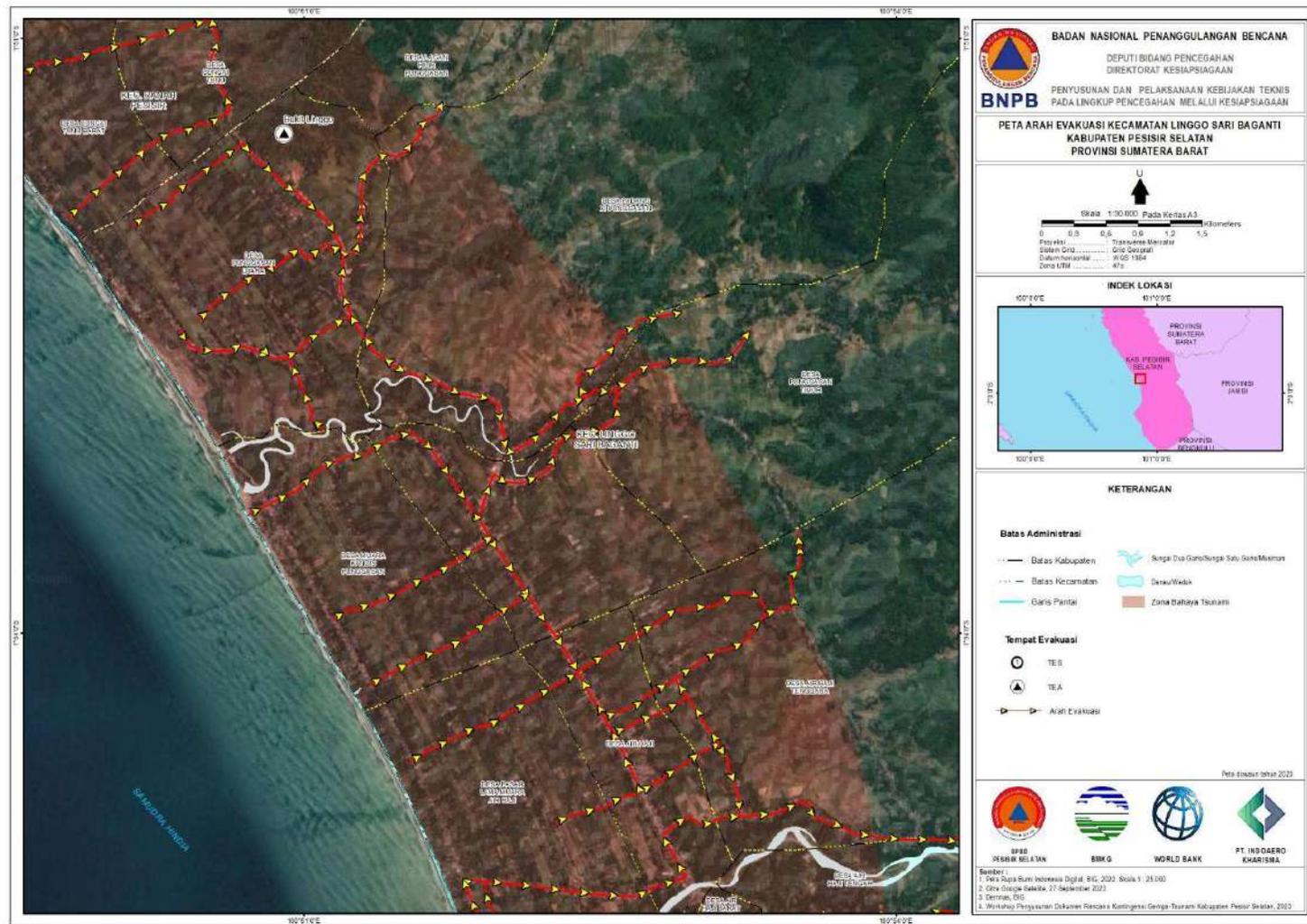


2. Peta Rencana Evakuasi

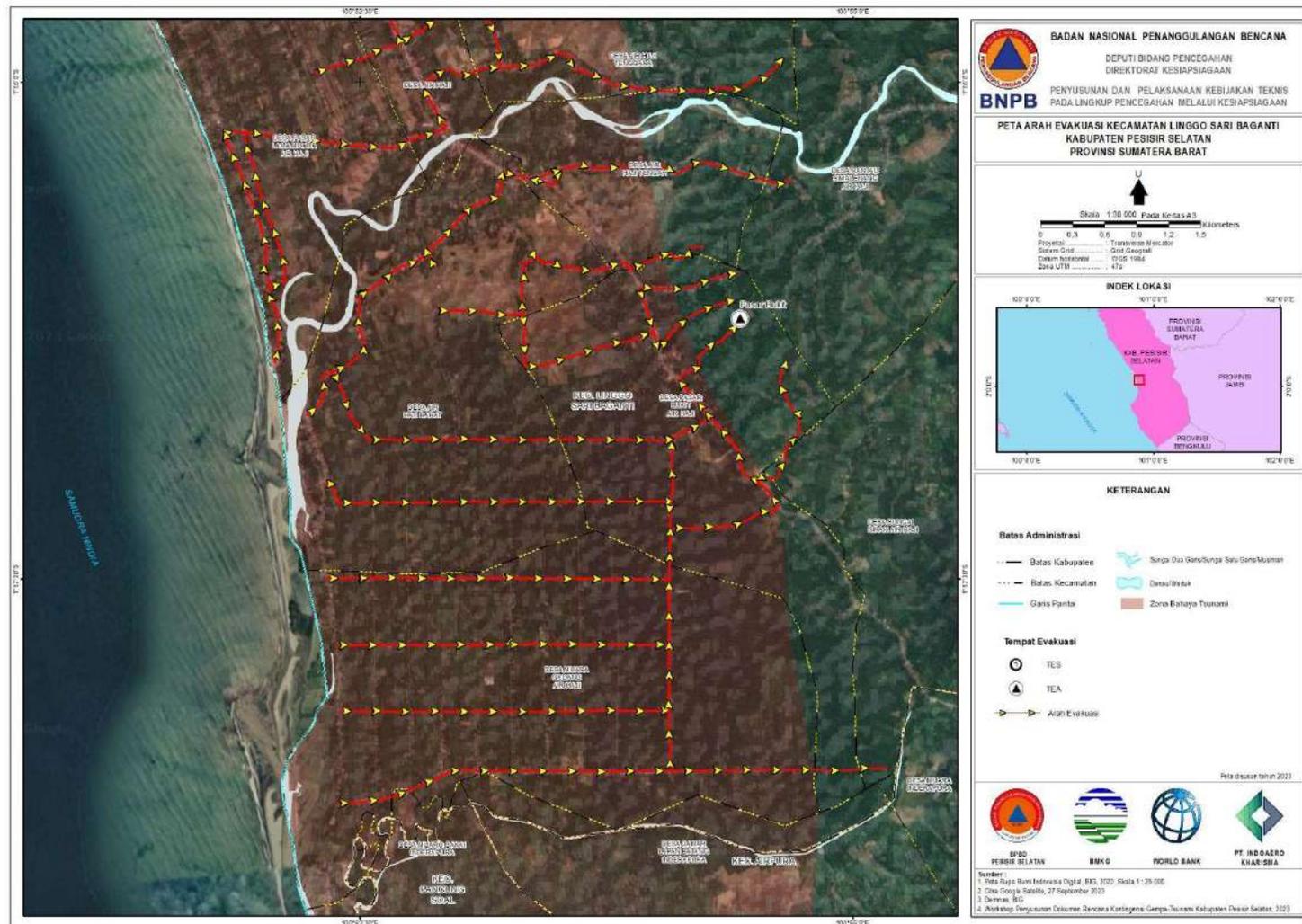


Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Airpura dan Pancung Soal

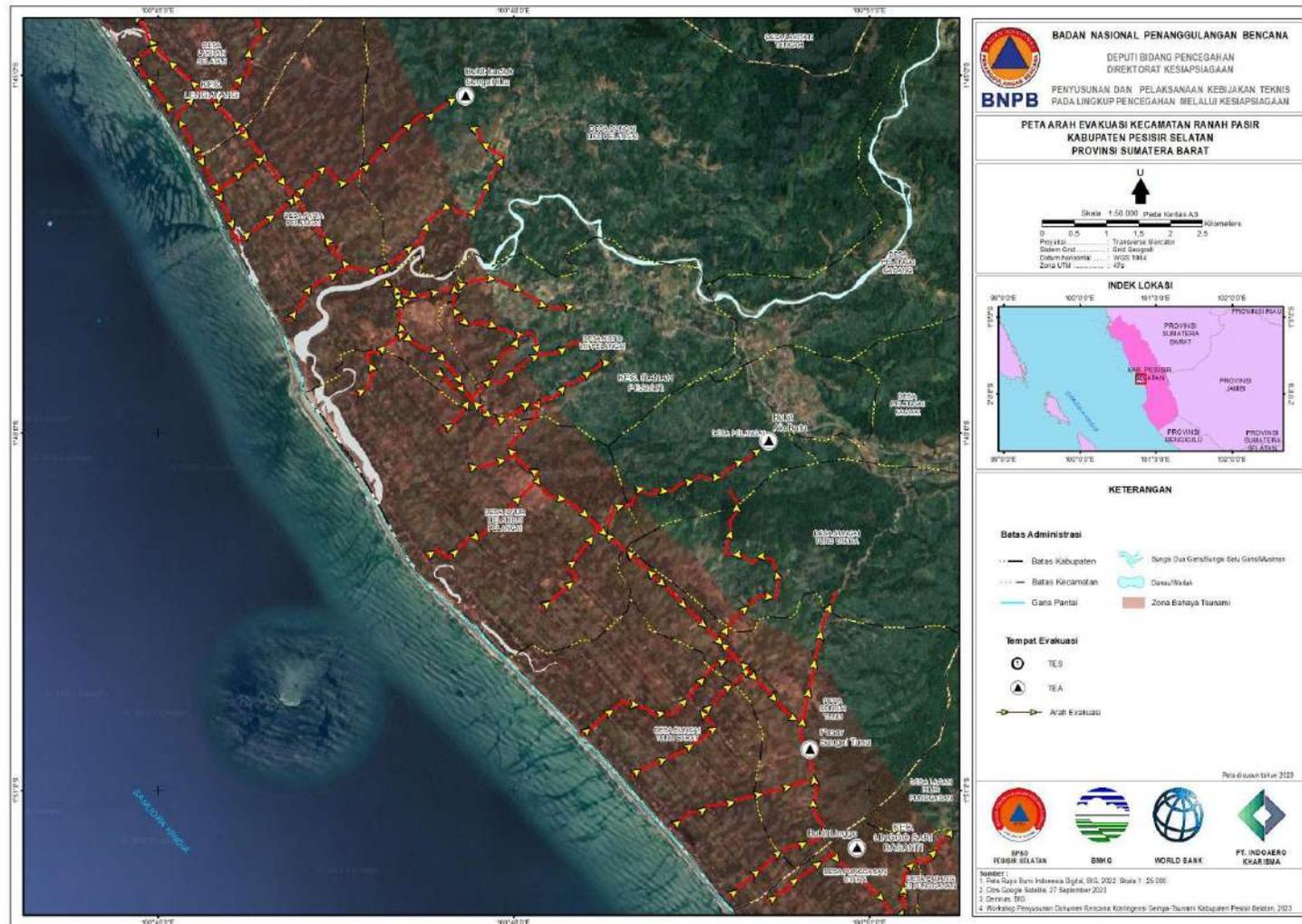




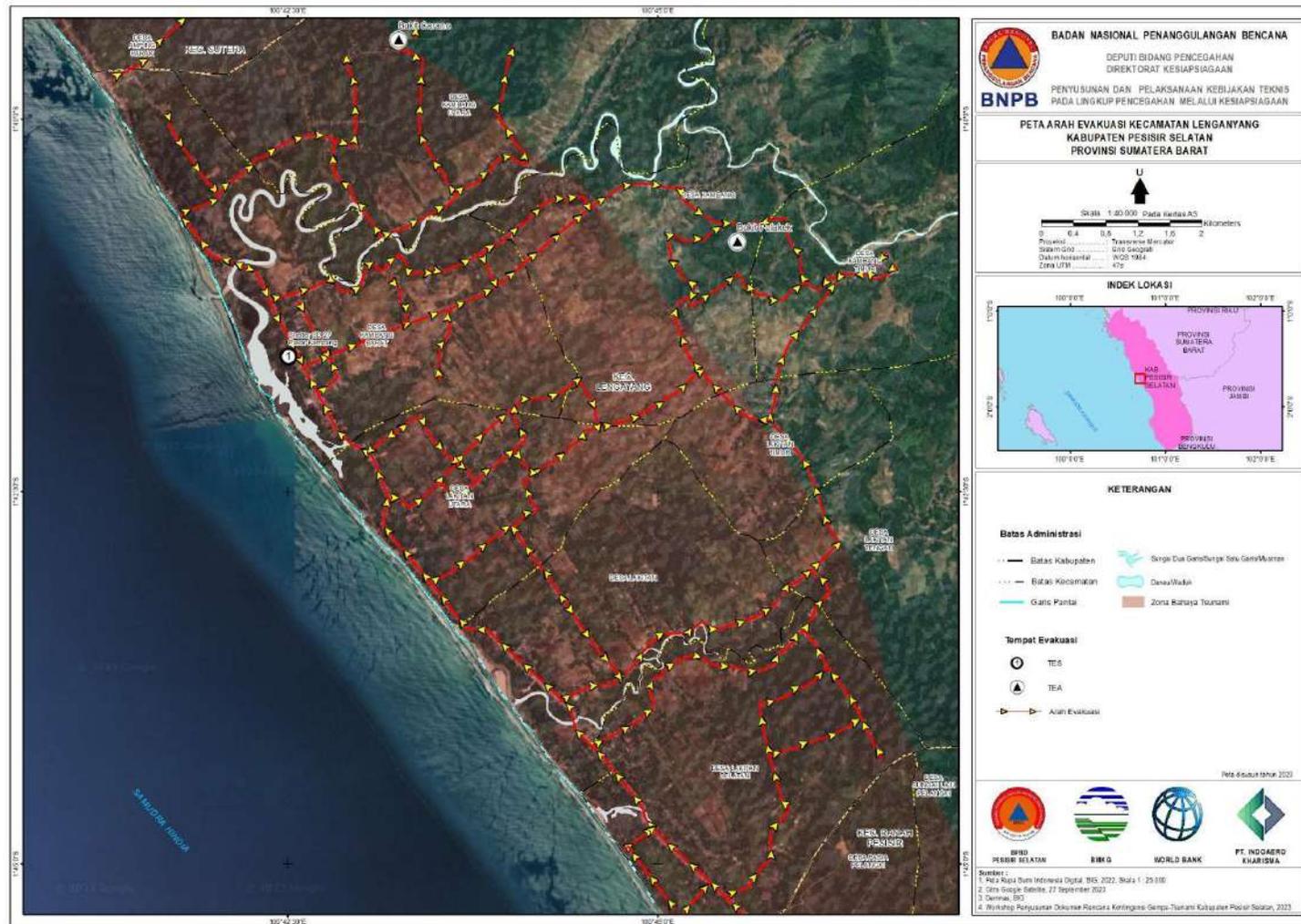
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Linggo Sari Baganti



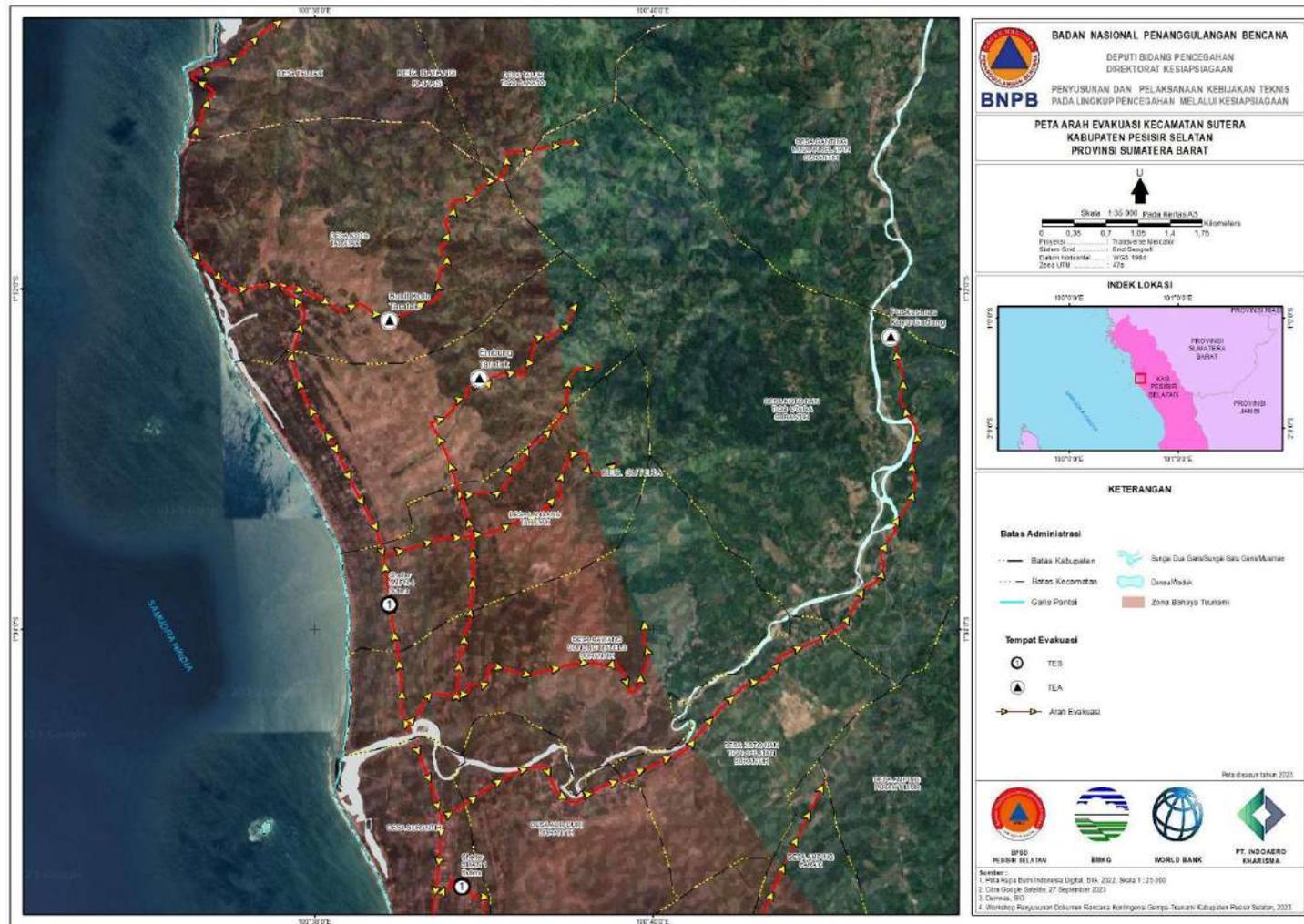
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Linggo Sari Baganti



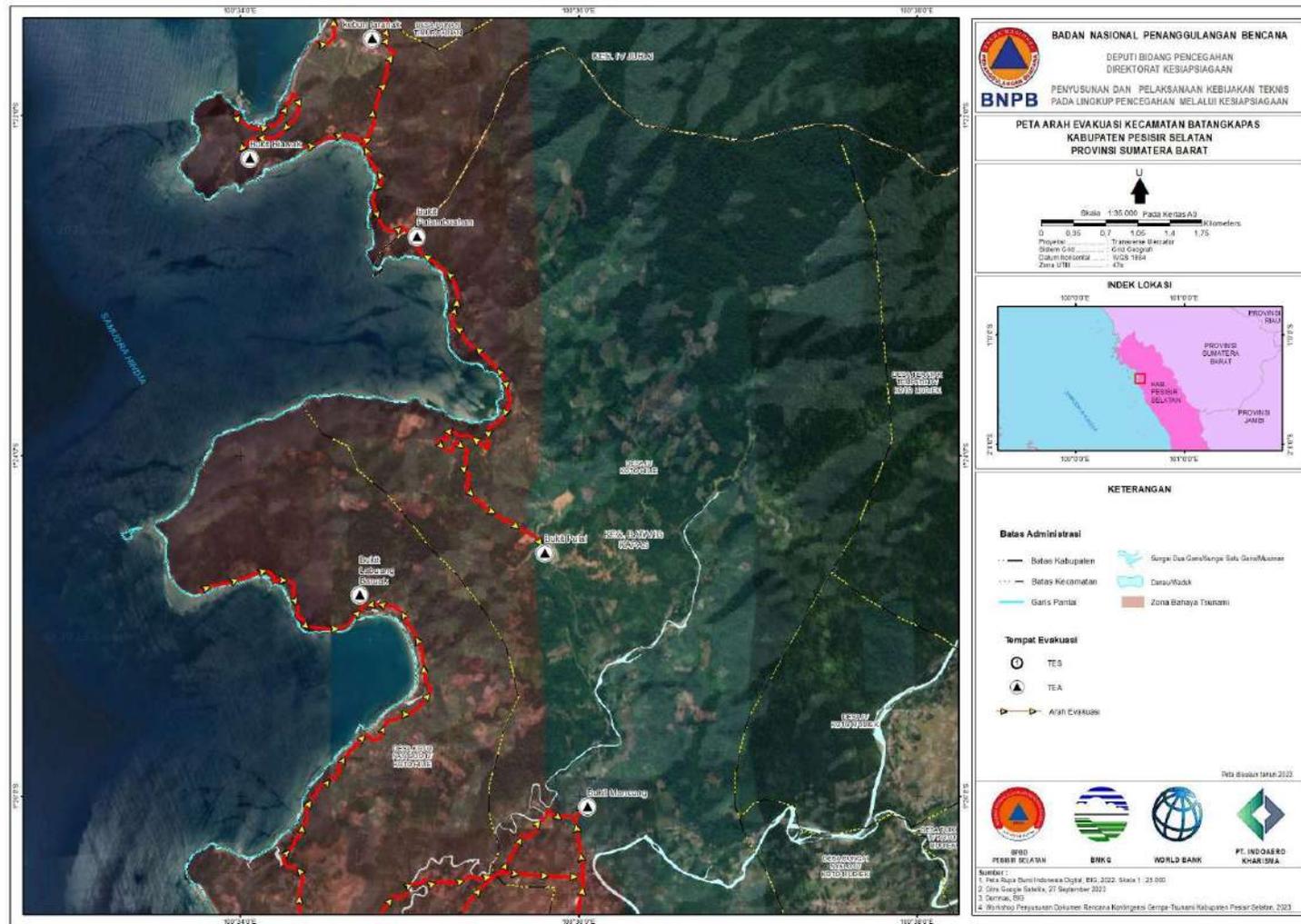
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Ranah Pasir



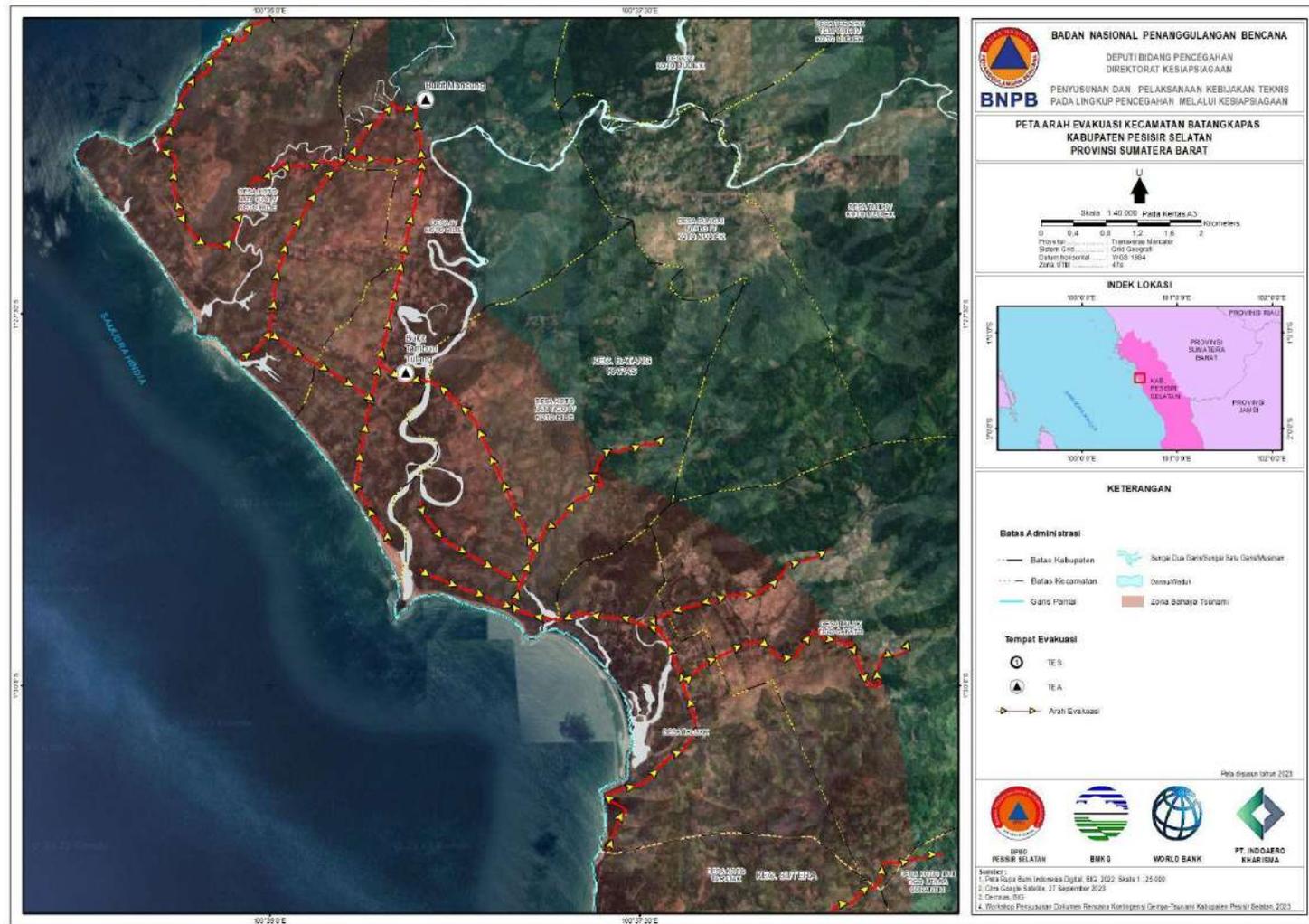
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Lengayang



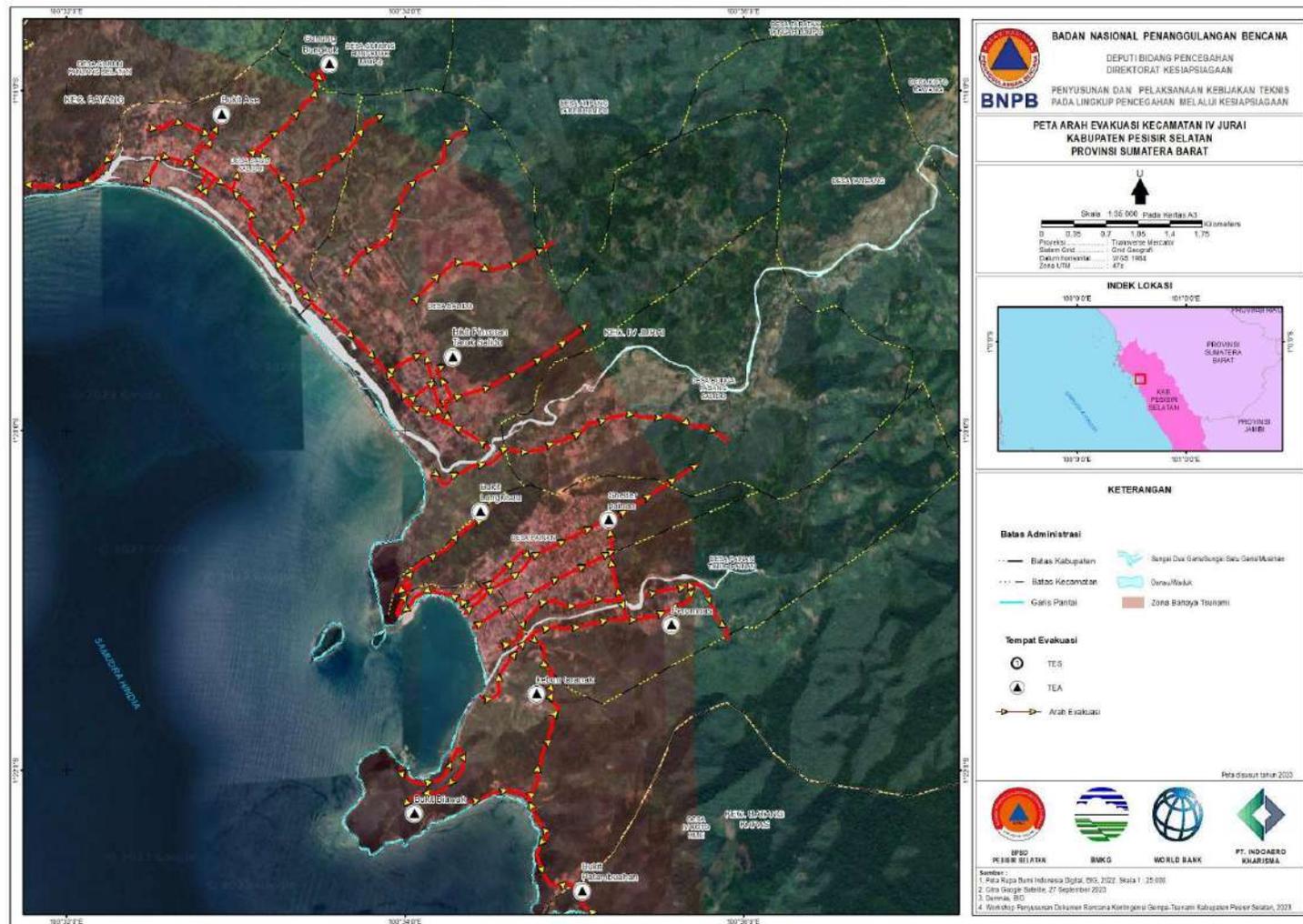
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Sutera



Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Batang Kapas



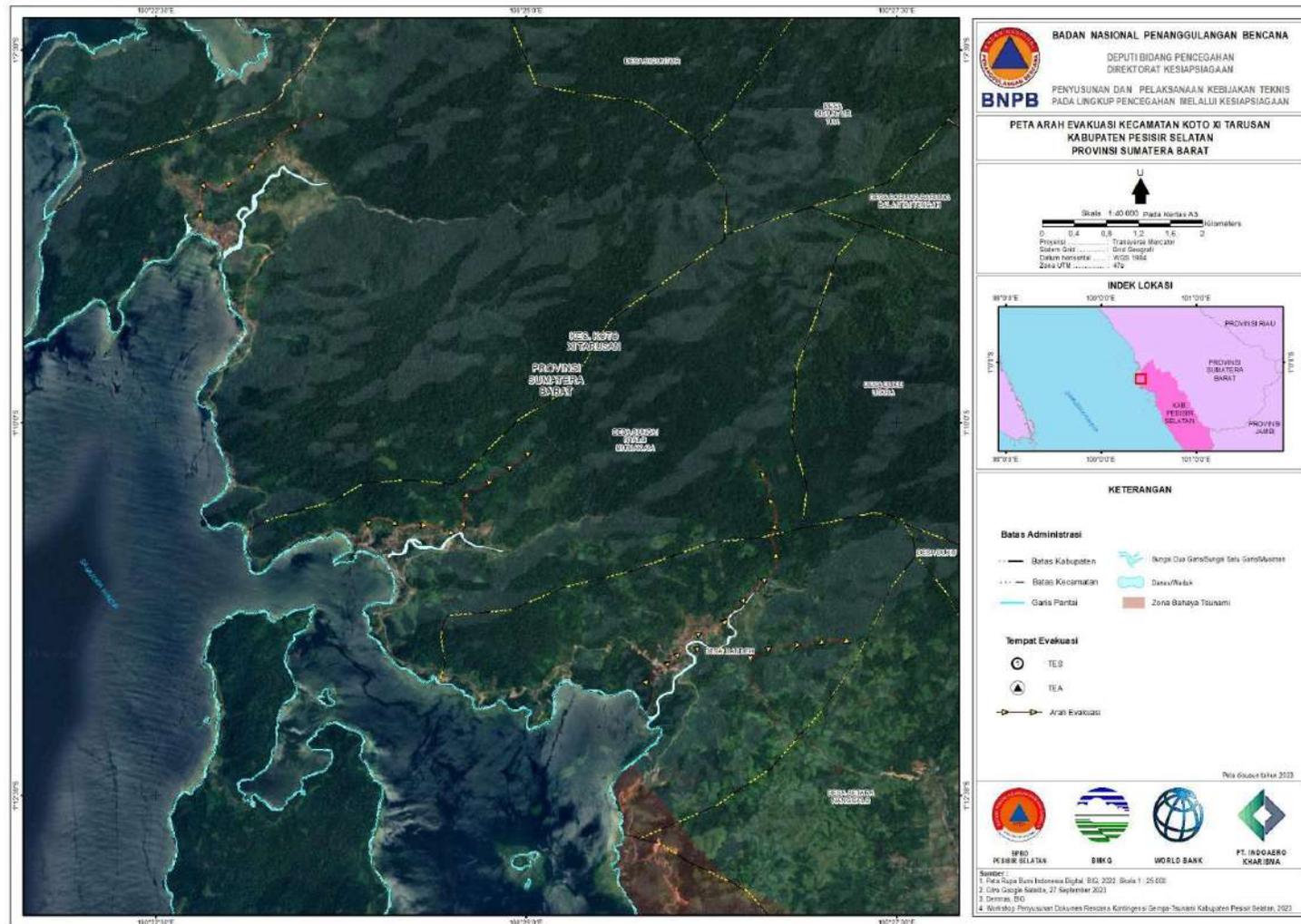
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Batang Kapas



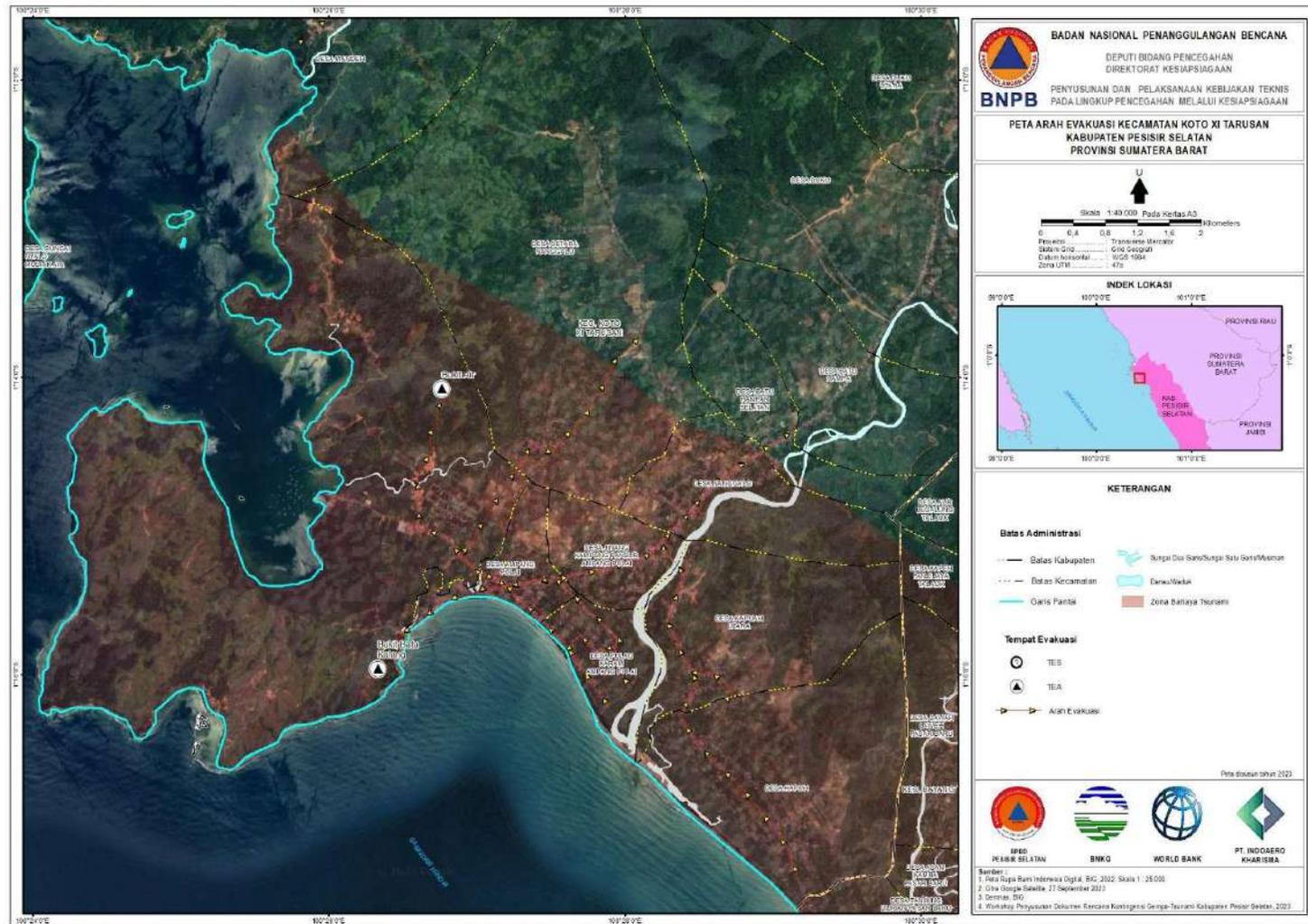
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan IV Jurai



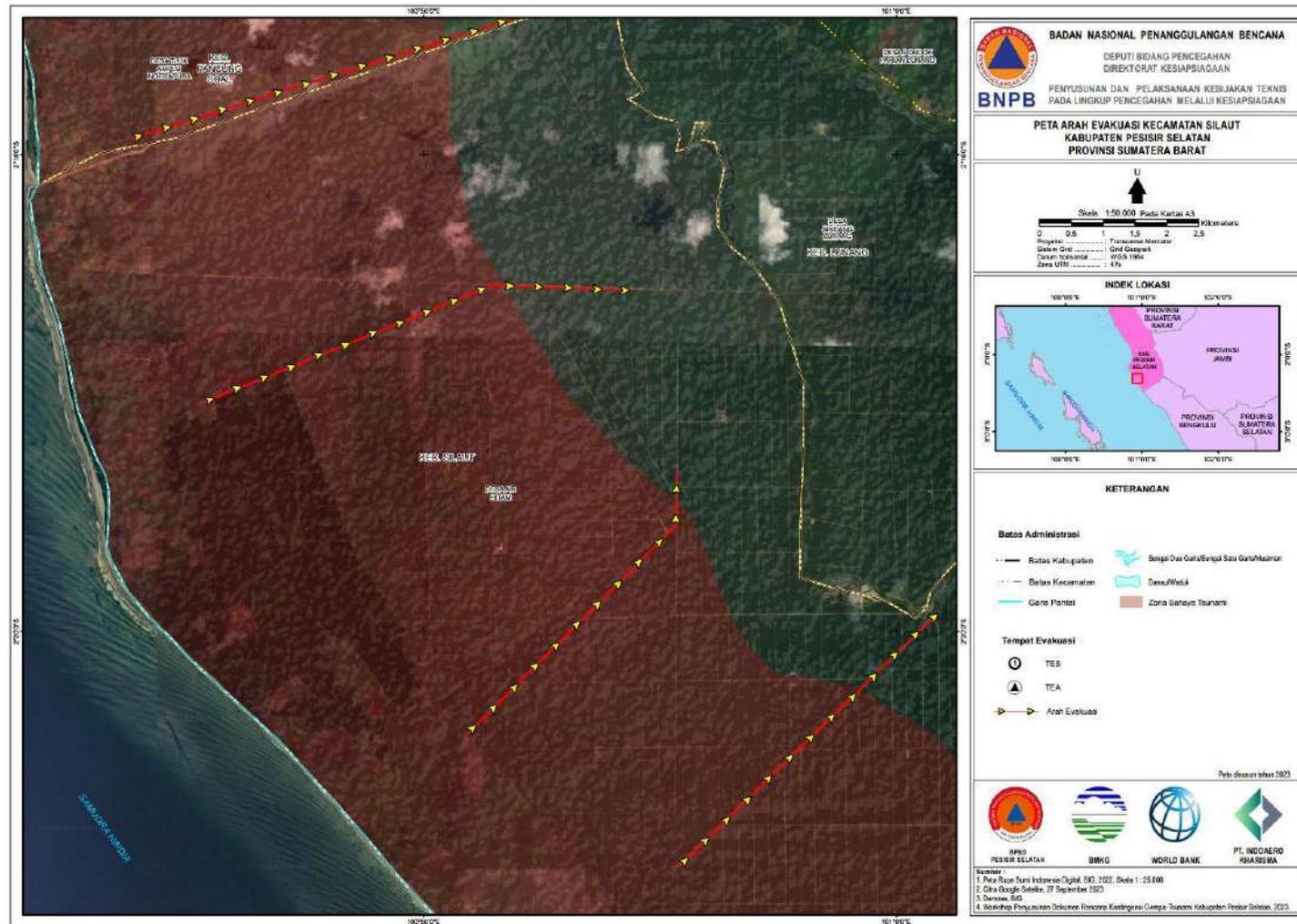
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Bayang



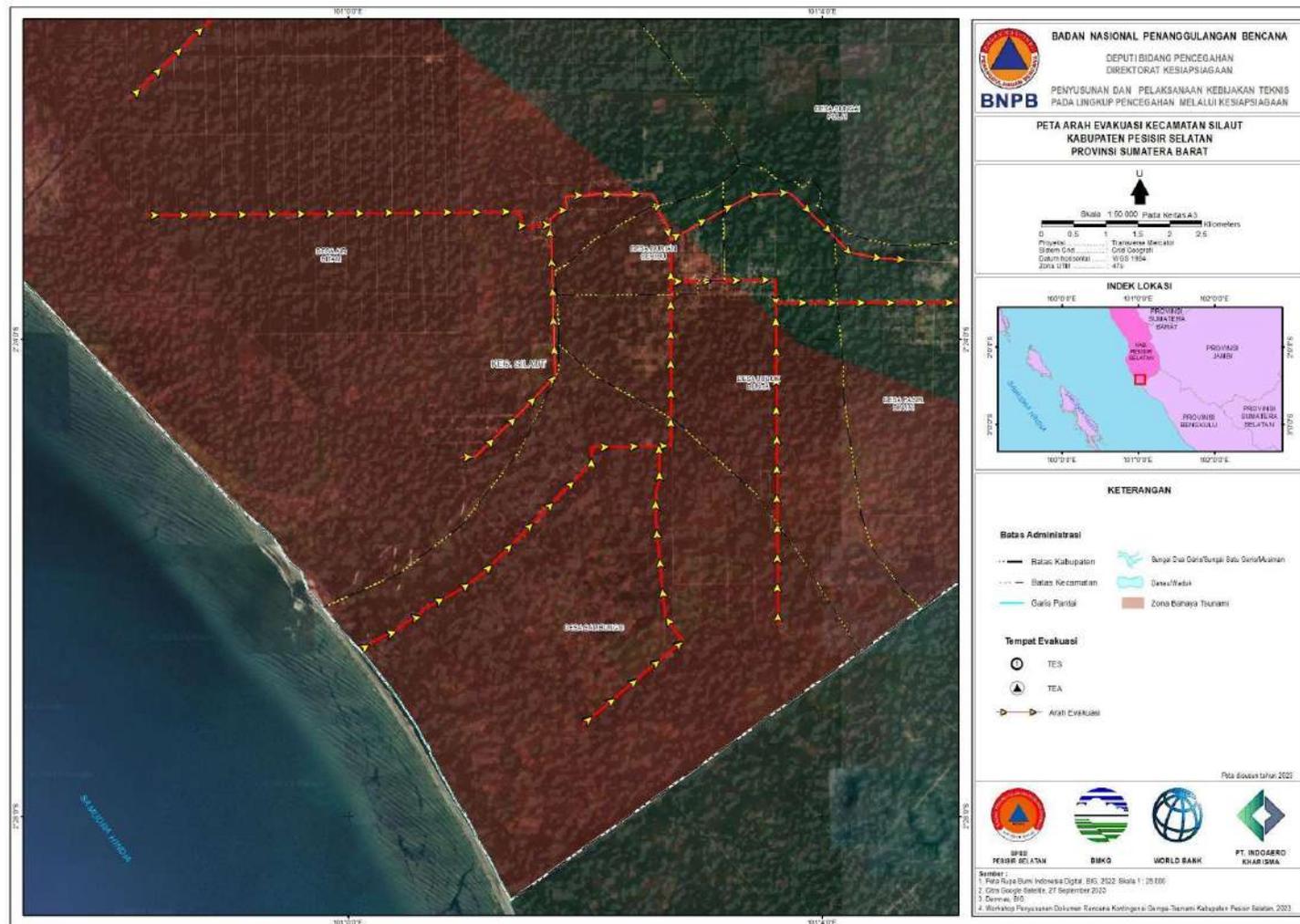
Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Koto XI Tarusan



Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Koto XI Tarusan

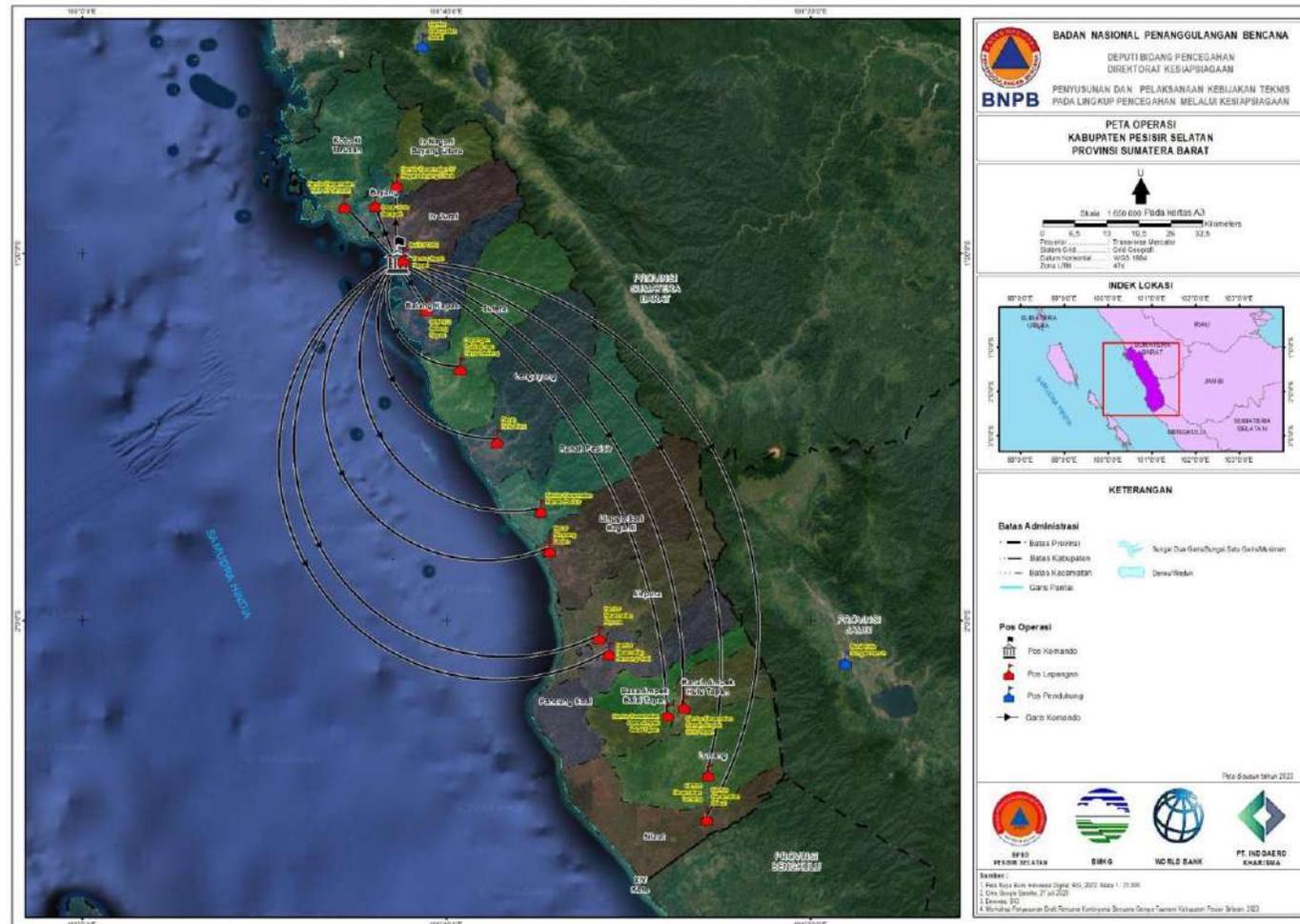


Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Silaut



Peta Jalur Evakuasi Kecamatan Silaut

3. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan



Peta Operasi Penanganan Darurat Bencana Gempa dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI - INATEWS



Lampiran 8. Rencana Evakuasi

1. Peringatan Dini Bahaya Bencana

Tsunami terjadi pada hari xxxxxx tanggal xxxxxxxx malam hari pukul 23:20:10 WIB, Kejadian Gempa berdurasi 20 detik dengan skala magnitudo 8,9, dengan Lokasi episenter gempabumi terletak pada koordinat 1.80 LS 99.60 BT dengan kedalaman 35 km Gempabumi. Terjadi di zona subduksi megathrust Mentawai Siberut:. Gempabumi tersebut membangkitkan tsunami yang berdampak pada seluruh pesisir wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketinggian gelombang tsunami 6 - 14 m dari muka air laut di tepi pantai. Kedatangan landaan tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan 20-25 menit, sehingga golden time (waktu tersisa untuk evakuasi) 20 menit.

KEJADIAN GEMPA	PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL			
↓	TANDA PERINGATAN	SARAN TINDAKAN ORANG		
5-10 MENIT SETELAH GEMPA	<p>Jika gempabumi terasa sedikit tapi berlangsung lama</p> <p>Jika gempa bumi terasa kuat dan berlangsung lama (misalnya lebih dari 1 menit dan orang tidak bisa berdiri)</p>	Menjauhi pantai dan tepi sungai, ke tempat yang telah ditentukan dan mencari informasi		
↓	PERINGATAN DINI BENCANA RESMI OLEH BMKG MELALUI:SIARAN TV/RADIO, SIRENE PERINGATAN TSUNAMI			
WAKTU KEDATANGAN TSUNAMI	TINGKAT PERINGATAN TSUNAMI (LEVEL)	PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG	SARAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH	SARAN TINDAKAN ORANG
18 – 33 MENIT	STATUS AWAS: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami lebih dari 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengevakuasi masyarakat ke tempat aman.	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, menunggu informasi!
	STATUS SIAGA: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami antara 1/2 meter – 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengevakuasi masyarakat ke tempat evakuasi terdekat.	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, mencari informasi
	STATUS WASPADA: MENJAUHI PANTAI & TEPIAN SUNGAI	Ketinggian tsunami kurang dari 1/2 meter.	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengarahkan masyarakat menjauhi pantai dan tepian sungai.	Menjauhi pantai dan tepian sungai, mencari informasi
	INFO GEMPA: TIDAK ADA ANCAMAN			Kembali ke aktivitas normal (tergantung tingkat kerusakan akibat

2. Pemicu Evakuasi

- Terjadi gempa bumi berkekuatan M 8,9 di Pesisir Selatan tepatnya di Segmen Mentawai - Siberut
- Gempa bumi dirasakan di wilayah Pesisir Selatan
- Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari Aplikasi, Medsos, TV/Radio/SMS

TABEL DESKRIPSI SKALA MMI (MODIFIED MERCALLY INTENSITY)

SKALA (MMI)	DESKRIPSI RINCI
I	Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luarbiasa oleh beberapa orang
II	Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang
III	Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu
IV	Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi
V	Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti
VI	Getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak, kerusakan ringan
VII	Tiap-tiap orang keluar rumah. Kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan
VIII	Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh
IX	Kerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak. Rumah tampak agak berpindah dari pondamennya. Pipa-pipa dalam rumah putus
X	Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam
XI	Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali
XII	Hancur-sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara

Orang **melakukan evakuasi mandiri** sesuai informasi peta/jalur evakuasi

- Menuju titik aman (tidak ada rambu)
- Pilihan terdekat, Menuju tempat kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi rambu)
- Pilihan terdekat, Menuju tempat pengungsian

3. Strategi Evakuasi

Perintah Evakuasi di Pesisir Selatan mengikuti arahan dari Kepala Desa

- Arahan untuk evakuasi dari Aparat Desa/Relawan/Tim Siaga Desa
- Untuk yang perlu dipandu dihimbau secara intens untuk segera menuju titik kumpul

Lampiran 9. SOP / Protap

SOP/Protap dari BPBD/OPD lain dalam penanganan darurat

1. Protap Penanggulangan Bencana

SOP Peringatan Dini

SOP SISTEM PERINGATAN DINI GEMPA DAN TSUNAMI

NO	Kegiatan	Operator	Supervisor	Manager/ Asisten	Penanggung Jawab	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Terjadinya Gempa, Operator langsung koordinasi dengan BMKG, dan menenangkan masyarakat sampai informasi gempa diterima dari BMKG					WRS (Warning Receiver System), DVB (Digital Video Broadcast), Akses internet, Alat komunikasi, form laporan harian	4 menit	Form laporan berisi informasi Gempa dari BMKG	Seluruh Personil pro aktif mencari informasi gempa dari BMKG
2	Menerima informasi awal / PD 1 dari BMKG					WRS (Warning Receiver System), DVB (Digital Video Broadcast), Akses internet, Alat komunikasi, form laporan harian		Informasi dari BMKG (tampilan dan printout)	
3	Supervisor mengkoordinir personil piket untuk melakukan diseminasi dan aktivasi sirene jika gempa berpotensi tsunami					Alat komunikasi, informasi BMKG (tampilan dan printout), perangkat aktivasi peringatan dini.	2 menit	Melakukan proses diseminasi dan aktivasi sirene	Proses diseminasi merujuk ke Alur Diseminasi Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami
4	Menerima laporan proses diseminasi gempa dan tsunami dan meneruskan informasi tersebut ke penanggung jawab					Lisan atau tertulis	2 menit	Menerima petunjuk dan arahan selanjutnya	
5	Memantau pemutakhiran PD II sd. PD IV dan mendiseminasikan kepada masyarakat dan instansi terkait					WRS (Warning Receiver System), DVB (Digital Video Broadcast), Akses internet, Alat komunikasi	4 jam	Pemutakhiran informasi PD II sd. PD IV dari BMKG dan laporan sementara dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi	Seluruh personil pusdalops proaktif memantau dampak gempa dan tsunami yang terjadi. Waktu diseminasi disesuaikan dengan informasi dan hasil pantauan BMKG.
6	Melakukan diseminasi pengakhiran peringatan dini tsunami (PD IV)					Alat komunikasi, informasi BMKG (tampilan dan printout)	5 menit	Proses diseminasi PD IV dilakukan	Petugas piket melaksanakan proses diseminasi
7	Melaporkan proses aktivasi dan pengakhiran peringatan dini gempa dan tsunami kepada manager sebagai laporan					Form laporan	2 menit	Form laporan diparaf	Menghimpun dan mengarsipkan semua informasi yang diterima
8	Menyusun dan membuat rekomendasi kebijakan / keputusan untuk penanggung jawab					Form laporan diparaf	30 menit	Saran tindak lanjut	Merujuk kepada SOP pelaporan informasi kejadian awal bencana

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ /BPBD-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Wednesday, March 16, 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		
		Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM NIP.196411061997031001
Unit Kerja Bidang Penanganan Darurat	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, peralatan dan logistik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)	
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat	
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD		
6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat		
7. PERKA BNPB No. 13 tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	1. Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, handycam, tustel, lampu penerangan	
	2. Logistik: sandang, pangan dan air bersih	
	3. Obat-obatan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. SOP ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, dan logistik dalam penanggulangan bencana	1. Formulir pendataan	
2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana	2. Data SDM, peralatan dan logistik yang tersedia	

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi lokasi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Pratap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat mandiri bencana				Hasil rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan Logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan Logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan Logistik	
7	Melakukan penentuan tatar bencana				Hasil rapat tim	30 mnt	Terperolehnya tatar bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Terzimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelaikan Prasar							

Prosedur Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ /BPBD-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Saturday, March 12, 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		 NIP.196411061997031001
Unit Kerja Bidang Penanganan Darurat	Nama SOP	SOP Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja BPBD	
6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat	
7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evakuasi	1. Formulir pencatatan
2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya

Prosedur Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		sub bid sub kad kabid	sekretaris ka lak. Badar		Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana			- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komunikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA			Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait			- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat			- Notulen - Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar			Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7	Melakukan pelaporan pelaksanaan			Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan			Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses						

Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/ 03 /SOP/ BPBD-PS/2021
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	3 Juni 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Ir. H. DONI GUSRIZAL MM NIP. 196411061997031001
Unit Kerja Bidang Penanganan Darurat	Nama SOP	SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)	
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat	
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.	3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.		
6. PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai		
7. PERKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
8. Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi		
9. Kepmen Pemukiman Dan PU No. 534 tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standart Pelayanan Minimal Bidang Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Pemukiman Dan PU		
10. Kepdirjen Bantuan Dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi dan Alat Komunikasi	
	2. Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas rumah tangga, kompor	
	3. Obat-obatan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
pemenuhan	1. Data jumlah korban bencana	
1. kebutuhan dasar korban bencana	2. Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan	
2. Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMENUHAN KEBUTUHAN PERALATAN MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPBJ	sub bid/ sub bag	sekretaris kabid	kelengkapan	waktu	Output	
1	Merencanakan pemenuhan kebutuhan peralatan Mitigasi PB				RKA	2 hari	Tersedianya Rancangan kebutuhan Peralatan Mitigasi PB	
2	Mengidentifikasi pemenuhan Kebutuhan Peralatan Mitigasi PB				Data Kebutuhan Peralatan Mitigasi P	2 hari	Tersedianya Data Kebutuhan Peralatan Mitigasi PB	
3	Menetapkan skala prioritas Kebutuhan Peralatan Mitigasi PB				Data Prioritas Kebutuhan Peralatan Mitigasi PB	1 hari	Tersedianya Data Skala Prioritas Kebutuhan Peralatan Mitigasi PB	
4	Melaksanakan Pengadaan Peralatan Mitigasi PB				1. Pengumuman Lel 2. Dokumen Lelang	36 hari	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Mitigasi PB	
5	Mengadakan Evaluasi Pengadaan Peralatan Mitigasi PB				Dokumen pengadaa Peralatan Mitigasi PB	2 hari	Terperolehnya hasil Pengadaan Peralatan Mitigasi PB	
6	Melaporkan hasil Pengadaan Peralatan Mitigasi PB				Laporan dan kontrak kerja	2 hari	Tersedianya kebutuhan Peralatan Mitigasi PB	
7	Mendistribusikan Peralatan Mitigasi PB				Peralatan Mitigasi P	4 hari	Terdistribusinya Peralatan Mitigasi PB	
8	Menyelesaikan Proses peralatan Mitigasi PB							

2. SOP KODIM 0311 Kabupaten Pesisir Selatan

PROSEDUR TETAP

Nomor :R/ /Protap/V/2016

Tentang

PENANGGULANGAN TSUNAMI

I. PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Sesuai dengan Keppres RI Nomor : 3 Tahun 2001 untuk menanggulangi bencana telah dibentuk wadah organisasi non struktural tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota dimana mempunyai, fungsi dan tugas yang saling terkait satu sama lain. Organisasi yang telah dibentuk tersebut berperan sangat penting dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam;
- b. Dampak dari suatu bencana sangat berpengaruh kepada pencapaian tujuan Pembinaan Teritorial yaitu menciptakan suatu ruang, alat dan kondisi juang yang teguh, melalui pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial. Walaupun secara organisasi penanggulangan bencana, para Bupati / Walikota dan Gubernur selaku Satlak dan Satkorlak, tetapi peranan aparat Kowil melalui pendekatan metode Binter meliputi Binkam dan Bakti TNI sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing; dan
- c. Agar dalam pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan lancar, berhasil serta berdaya guna, Aparat Kowil beserta Pemda dan Kepolisian serta pemuka-pemuka masyarakat perlu memahami tentang organisasi penanggulangan, serta tugas dan fungsinya mulai dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.

Memberikan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan Tsunami.

b. Tujuan .

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan prosedur tetap tentang pelaksanaan penanggulangan Tsunami sehingga dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar serta mencapai hasil yang optimal.

3. Ruang lingkup dan Tata Urut.

Ruang lingkup pelaksanaan penanggulangan Tsunami disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Ketentuan Umum.
- c. Pengorganisasian.
- d. Prosedur Tindakan Penanggulangan Tsunami.
- e. Komando dan Perhubungan.
- f. Penutup.

4. Dasar.

- a. Surat Telegram Danrem 032/Wbr Nomor ST/479/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang perintah untuk melaksanakan, mempersiapkan dan melaksanakan tindakan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa;
- b. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep : 461/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang naskah sementara petunjuk pelaksanaan bantuan TNI kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam.
- c. Prosedur Tetap Bantuan TNI AD kepada pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi, Jakarta 1 Juli 2006.
- d. Rencana Kontijensi penanganan Bencana Alam TA. 2007.
- e. Surat Telegram Danrem 032/Wbr Nomor : ST/491/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang pembuatan Prosedur Tetap Satuan

II. KETENTUAN UMUM

1. Umum.

- a. Sejalan dengan gerakan reformasi Nasional Pimpinan TNI mengambil Kebijakan untuk mengembalikan jati diri Prajurit, dengan melakukan program reformasi internal TNI. TNI AD merupakan

bagian integral dari TNI, untuk menjabarkan program tersebut dengan melakukan peningkatan kemampuan Aparat Kowil, guna penyesuaian terhadap perubahan sosial.

- b. Guna menyeimbangkan antara tuntutan bangsa dengan kondisi nyata kemampuan teritorial yang dimiliki oleh Aparat Kowil saat ini, dalam penanggulangan bencana alam maka perlu dibuat Prosedur Tetap Satuan sebagai pedoman Aparat Kowil di lapangan.

2. Bentuk Objek Penanggulangan Tsunami.

- a. Masyarakat dan lingkungan di daerahnya rawan bencana.
- b. Para Korban Bencana.

3. Bentuk-bentuk Ancaman terhadap Objek Penanggulangan Tsunami.

- a. Bencana Alam. Fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geografis, biologis, hidrologis, dan metrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka.
- b. Bencana Ulah Manusia. Peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, meteorologi, integrasi manusia dengan lingkungannya atau interaksi manusia didalam dan diantaranya masyarakat itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.

III. PENGORGANISASIAN

1. Umum.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Tsunami agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, berhasil serta berdaya guna bagi Aparat Kowil, Pemda, Kepolisian dan Pemuka masyarakat perlu memahami organisasi penanggulangan bencana.

2. Organisasi.

Untuk pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten dibentuk Satuan Pelaksanaan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua TRC dipimpin langsung oleh Bupati Kab. Pessel.
- b. Wakil Ketua TRC dijabat :
 - 1) Dandim sebagai wakil I
 - 2) Kapolres Sebagai wakil II

- c. Pelaksana Harian TRC dijabat oleh Kabag Kasbag Linmas.
- d. TRC terdiri dari dinas-dinas dan instansi Vertikal di daerah TNI, Polri, Kesehatan, Sosial, pekerjaan umum, Perhubungan dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

3. Tugas dan Tanggung Jawab.

Tugas dan tanggung jawab Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Yaitu :

- a. Melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung di daerahnya dengan memperdayakan aparat, serta dan prasarana yang ada diwilahnya.
- b. Melakukan kerja sama penanggulangan bencana dengan dengan pemda Propinsi.
- c. Melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, geladi dan pembinaan.
- d. Melakukan penerimaan dan penyuluhan serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana.
- e. Melakukan kegiatan lain petunjuk Gubernur selaku ketua Tim Reaksi Cepat (TRC).

IV. PROSEDUR TINDAKAN PENANGGULANGAN TSUNAMI

1. Protap Bahaya Tsunami.

- a. Tujuan
 - 1) Mencegah terjadinya korban lebih besar.
 - 2) Mengurangi dampak dan kerugian yang disebabkan bencana tsunami.
 - 3) Mencari dan menyelamatkan korban manusia.
 - 4) Mengembalikan kehidupan seperti keadaan semula.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

Fenomena sebab-akibat.

- 1) Gempa merupakan peristiwa alam, terjadi secara mendadak, timbul sebagai akibat pergeseran relatif batuan / lempeng tektonik/kerak bumi, dalam banyak kasus menimbulkan banyak kerugian harta benda, bahkan korban manusia.
- 2) Gempa tidak dapat diramalkan tempat dan waktu terjadinya secara pasti.
- 3) Hanya bisa dideteksi setelah terjadi gempa.

c. Upaya Mitigasi Bencana Tsunami secara menyeluruh.

1) Upaya Struktur (Fisik)

Metode Perlindungan Alami (Mangrove, sand dune, terumbu karang, Hutan Pantai).

2) Metode Perlindungan Buatan.

a) Breakwater, tembok laut, tanggul, konstruksi pelindung, SHELTER, Bukit buatan.

b) Struktur tahan bencana:

- (1) Sisi panjang dari struktur sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan antisipasi arah penjalaran gelombang.
- (2) Shear wall dan lateral bracing ditempatkan searah dengan penjalaran gelombang.
- (3) Lantai terbawah dari bangunan dibuat terbuka.
- (4) Rumah panggung.

c) Upaya Nonstruktur (Non Fisik), antara lain :

- (1) Pembuatan Peta Rawan Bencana
- (2) Peraturan Perundangan
- (3) Kelembagaan
- (4) Sistem Peringatan Dini
- (5) Pemindahan/Relokasi
- (6) Tata Ruang, Tata Guna Lahan, Zonasi
- (7) Penetapan Sempadan Pantai
- (8) Informasi Publik & Penyuluhan

- (9) Penegakan Hukum,
- (10) Pelatihan Dan Simulasi Mitigasi Bencana Tsunami,
- (11) Building Code
- (12) Integrated Coastal And Ocean Management
- (13) Pengentasan Kemiskinan

d) Apa yang harus dilakukan saat terjadi tsunami.

- (1) Berlindung saat ada gempa. Jika berada di dekat pantai dan merasakan getaran gempa segera berjongkok, berlindung di bawah meja dan hati-hati terhadap jatuhnya reruntuhan.
- (2) Segera pergi menjauhi pantai ke tempat yang lebih tinggi (bukit, gedung dll) mungkin anda hanya punya waktu beberapa menit saja.

d. Pelaksanaan.

Mekanisme pelaksanaan penanggulangan bahaya Tsunami di wilayah Pesisir Selatan.

1) Muspida.

- a) Musyawarahkan tindakan-tindakan yang perlu diambil
- b) Mengkoordinasikan dengan semua instansi yang ada hubungan dengan bahaya Tsunami.
- c) Bila mukiin / perlu mita petunjuk dari Muspida.
- d) Melaporkan kepada atasannya masing-masing.

2) Kodim 0311/Pessel dan Unsur lainnya yang ada di daerahnya.

- a) Memberikan bantuan semaksimal mungkin dalam penanggulangan Tsunami baik bantuan personel maupun alat peralatan yang ada.
- b) Mengkoordinasikan dengan satuan pengamanan yang lain dalam pelaksanaan tugas-tugas membantu penanggulangan bahaya Tsunami.
- c) Turut mengamankan / mengambil tindakan terhadap kemungkinan pihak-pihak yang mengambil kesempatan dengan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan pengusutan.
- d) Para petugas yang berkewajiban untuk menerima dan menyampaikan laporan kepada komandan / kepala bagian masing-masing apabila menerima berita adanya tanda-tanda terjadinya Gelombang Tsunami setelah terjadinya Gempa.

3) Instansi Sipil/ Masyarakat

a) Apabila melihat/mengetahui terjadinya suatu bahaya gunung meletus/ gempa bumi, baik kecil maupun besar, maka diwajibkan segera melaporkan/ memberitahukan kepada pihak yang berwajib atau masyarakat yang ada disekitar pantai.

b) Sistem pemberitahuan dapat menggunakan sarana komunikasi yang ada diwilayah dengan membuat hal-hal sebagai berikut :

- (1) Tanda bahaya Tsunami (Apabila diketahui)
- (2) Upaya-upaya penyelamatan.
- (3) Menempati daerah-daerah ketinggian

c) Berikan bantuan sepenuhnya dengan cepat setiap ada tanda-tanda terjadinya Tsunami dengan tidak melupakan pengendalian keadaan yang terkoordinir.

d) Pemerintah Daerah sbb :

- (1) Berkewajiban untuk menerima laporan dari pihak lain maupun yang datang dari masyarakat yang ada kaitannya dengan bahaya Gelombang Tsunami.
- (2) Menentukan lokasi tempat evakuasi atau tempat ketinggian untuk penampungan pengungsi sementara Gelombang Tsunami.
- (3) Menentukan kerugian nilai materi/ personel akibat Tsunami dengan mengkoordinasi dengan pihak yang berwenang/ muspida.
- (4) Mengkoordinasikan dengan semua pihak yang ada kaitannya dengan dukungan materil penanggulangan bahaya Tsunami.

e) Kepala Rumah Sakit Umum/ TNI

- (1) Memberikan pertolongan pertama secara maksimal kepada korban Gelombang Tsunami.
- (2) Merawat korban apabila kemungkinan adanya kecelakaan akibat bahaya Gelombang Tsunami.
- (3) Jika tidak mungkin dapat dirawat didaerah segera dikirim/ dievakuasi kedaerah lain yang dapat merawatnya.

f) Kodim 0311/Pessel memberikan informasi mengenai langkah-langkah keselamatan Tsunami sebagai berikut :

- (1) Tidak semua Gempa bumi mengakibatkan Tsunami, tetapi kebanyakan adalah berpotensi menghasilkan gelombang Tsunami. Apabila anda mengetahui Gempa Bumi telah terjadi, bersiaplah untuk mendengarkan petunjuk atau tanda-tanda terjadinya Tsunami.

- (2) Jangan terus berada di kawasan rendah atau ditepi pantai apabila terasa getaran gempa bumi yang kuat melihat tanda-tanda atau mendengar pengumuman. Bergerak lah menuju kekawasan yang tinggi dan aman.
- (3) Tsunami merupakan satu sisi gelombang Tetap lah berada didaerah dataran tinggi sehinga pemerintah daerah akan mengumumkan keadaan benar-benar aman.
- (4) Gelombang Tsunami yang kecil pada suatu pantai mungkin boleh terjadi sangat besar beberapa meter dari semula. Jangan menganggap enteng terhadap gelombang Tsunami yang kecil.
- (5) Kehadiran Tsunami biasanya didahului dengan air laut yang surut dengan tiba-tiba. Ini adalah tanda-tanda awal terjadinya Tsunami dan perlu ketahui dan menjadi perhatian masyarakat.
 - (6) Semua pengumuman Tsunami yang dikeluarkan perlu di tanggapi secara serius oleh masyarakat. Tsunami yang terjadi pada bulan Mai tahun 1960 di Hilo-hawai, telah menelan korban jiwa sebanyak 61 orang karena masyarakat menganggap pengumuman yang dikeluarkan pemerintah hanyala satu kesalahan atau pengumuman yang berlebihan.
 - (7) Semua Tsunami berpotensi untuk menjadi berbahaya walaupun mukin tidak memusnakan semua daerah yang dilewati.
 - (8) Jangan sesekali pergi ketepi pantai untuk melihat gelombang Tsunami. Apabila Gelombang Tsunami dilihat, anda sudah terlalu dekatnya dan sukar untuk menyelamatkan diri.
 - (9) Semasa berlakunya keadaan berbahaya akibat Tsunami, pihak pemerintah, pengamanan (TNI/POLRI) dan badan-badan penyelamat yang lain akan menyelamatkan jiwa masyarakat bantu lah dan arus sepenuhnya melaksanakna kerja sama.

b. Instruksi Koordinasi

- 1) Tanda-tanda Tsunami setelah terjadi gempa yaitu berupa pemukulan alat kentongan, lonceng, beduk dan sirine sebagai berikut :
 - a) Kentongan, lonceng, beduk, pukulan 2 (dua) sekali secara terus menerus selama 2 (dua) menit.

Contoh : 00....00....00....dan seterusnya.

b) Sirine dibunyikan 2 (dua) kali secara bergelombang selama 2 (dua) menit.

2) Tanda Aman.

a) Dengan kentongan, lonceng dan beduk, pukulan 1 (satu) kali secara terus menerus selama 2 (menit).

Contoh : 0.....0.....0.....dan seterusnya.

b) Sirine dibunyikan 2 (dua) kali secara (gelombang) dengan masing-masing gelombang selama 2 (dua) menit.

3) Laksanakan koordinasi dengan BMG no telp (0752)

4) Tanda bahaya dan tanda aman dibunyikan atas perintah yang berwenang.

V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. Administrasi.

a. Dukungan Dana.

- 1) Pengeluaran dana bencana merupakan otoritas penuh Ketua Satlak PBP Kab. Pesisir Selatan.
- 2) Apabila Ketua Satlak PBP berhalangan, maka pengeluaran dana bencana dapat diberikan atas persetujuan sekurang kurangnya salah seorang Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Harian.
- 3) Pengeluaran dana pada point 2 diatas, hanya untuk hal-hal yang bersifat tidak dapat ditunda, khususnya untuk penyelamatan awal korban. Seperti : makan, obat-obatan, peralatan.
- 4) Penanggung-jawab lapangan dapat mengambil keputusan untuk mengadakan makan, obat-obatan, peralatan dengan cara menanggulangi/ meminjam beli dan melaporkan segera untuk mendapat pembayaran/ penggantian.
- 5) Dana bencana digunakan sesuai kebutuhan dan penanggung-jawab lapangan membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana.

6) Penggunaan dana selain makan, obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan untuk penyelamatan awal di lapangan harus atas persetujuan Ketua Satlak PBP Kab. Pesisir Selatan.

b. Laporan.

1) Laporan situasi setiap hari dibuat dan dikirim oleh POKOLA kepada PUSKODALOPS pada pk.17.00. WIB. Format laporan (Terlampir)

2) Laporan lengkap dibuat oleh PUSKODALOPS.

2. Logistik.

a. Makanan dan air minum.

1) Dukungan makan untuk korban bencana dan petugas penyelamat, apabila masih memungkinkan menggunakan potensi di wilayah setempat ataupun sekitar lokasi bencana.

2) Apabila karena suatu keadaan sumber logistik wilayah tidak berfungsi, diadakan dapur lapangan oleh Satgas Logistik TRC Kab. Pesisir Selatan.

3) Dukungan air minum (tanpa dimasak) diberikan sesuai kebutuhan.

b. Obat-obatan.

1) Dalam keadaan sangat terpaksa penanggung jawab lapangan dapat mengadakan obat-obatan dari wilayah setempat.

2) Dalam keadaan biasa, kebutuhan obat-obatan ditangani oleh Satgas Kesehatan Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan.

c. Tempat pengungsian.

1) Tempat pengungsian sedapat mungkin dekat dengan jalan untuk memudahkan proses evakuasi dan pendistribusian logistik.

2) Tempat pengungsian dapat menggunakan fasilitas instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

3) Satgas Pekerjaan Umum segera menyiapkan fasilitas sanitasi guna menghindarkan penderitaan pengungsi.

d. Angkutan.

- 1) Selama siaga bencana seluruh fasilitas angkutan instansi pemerintah diprioritaskan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
- 2) Fasilitas angkutan instansi swasta/ masyarakat dapat digunakan atas ijin/ kesepakatan pemilik.

e. Bantuan.

- 1) Bantuan bencana yang berasal dari pemerintah Propinsi, Pusat, Masyarakat ataupun dari sumber yang lain yang hendak diserahkan kepada masyarakat korban bencana difasilitasi oleh Satgas Donasi Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan tidak diserahkan secara langsung.
- 2) Pada saat bencana Satgas Donasi Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan membuka akses luas dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mencari bantuan dalam rangkapananggulangan bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, Satgas Donasi harus memiliki jaringan sumber donasi di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional.

VI. KOMANDO DAN PERHUBUNGAN

1. Komando.

a. Puskodalops.

- 1) Puskodalops digelar 1 x 24 jam, 7 hari seminggu pada saat bencana maupun tidak terjadi bencana.
- 2) Puskodalops berkedudukan di JL. H. Ilyas Yakub Painan Kab. Pesisir Selatan.
- 3) Pada saat biasa (tidak bencana), Piket Puskodalops diatur oleh Kakesbanglinmas Kab. Rembang sebanyak 3 (tiga) orang diambil dari unsur Satgas/ Unit Satlak PBP Kab. Pesisir Selatan secara bergiliran.
- 4) Piket Puskodalops melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan (Rincian Tugas Terlampir) dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab.
- 5) Pada saat terjadi bencana, unsur pimpinan Satlak PBP Kab. Pesisir Selatan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan komando dan pengendalian di Puskodalops.
- 6) Perlengkapan Puskodalops.

- a) Alat komunikasi. Telepon, Faximile, Radio Transceiver, Internet, Alat monitor.
 - b) Televisi satelit/ indovision, radio penerima all band/ satelit.
 - c) Daftar nomor telepon penting.
 - d) Peta-peta. Peta situasi bencana Kab. Pesisir Selatan, Peta operasi bencana Kab. Pesisir Selatan, Peta Jateng.
 - e) Papan Data. Data materiil/ peralatan, data alat angkut, data logistik wilayah, dll.
 - f) Ruang briefing, ruang kendali, ruang istirahat piket.
- b. Pos Komando Lapangan (POKOLA)
- 1) Pos Komando Lapangan digelar saat terjadi bencana sekurang-kurangnya derajat satu tiga, sedekat mungkin dengan lokasi bencana.
 - 2) Dikendalikan langsung oleh Ketua Pelaksana Harian, atau sekurang-kurangnya Kakesbanglinmas Kab. Pesisir Selatan.
 - 3) Perlengkapan Pos Komando Lapangan.
 - a) Alat Komunikasi.
 - b) Radio Transceiver, Telepon lapangan/ HP, kurir.
 - c) Papan data.
 - d) Papan informasi.

2. Perhubungan.

- a. Gelar Komunikasi.
 - 1) Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan menggunakan sistem komunikasi yang sudah digelar saat ini, yaitu komunikasi telepon dan radio transceiver.
 - 2) Saat terjadi bencana, Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan menyiapkan Repeater Portable guna memudahkan komunikasi, khususnya apabila daerah bencana sulit dijangkau gelombang radio transceiver yang telah digelar.
- b. Bantuan Komunikasi.
 - 1) Bantuan komunikasi dari masyarakat berasal dari ORARI maupun RAPI.
 - 2) ORARI dan RAPI merupakan unsur dari Satgas Komunikasi Satlak TRC Kab. Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Demikian Protap Penanggulangan Tsunami ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi personel di lapangan.

Dikeluarkan di : Painan

pada tanggal : Mei 2016

Komandan Kodim 0311/Pessel,

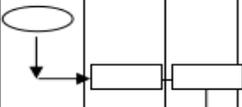
Setiya Asmara, S.I.P.

Letnan Kolonel Inf NRP 11980052230577

3. SOP Polres Pesisir Selatan

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PESISIR SELATAN	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal revisi Tanggal Efektif	/SOP/III/2023/RES PESSEL 30 DESEMBER 2022 30 DESEMBER 2022 02 JANUARI 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN  NOVIANTO TARYONO, S.H., S.I.K., M.H. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81111054
BAGIAN OPERASIONAL	Judul SOP	PENANGGULANGAN BENCANA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK AZAZI MANUSIA 3. PERKAP NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA 4. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG SOTK MABES POLRI TINGKAT POLRES DAN POLSEK 5. PROTAP KAPOLRI NOMOR : PROTAP/01/00/2010 TANGGAL 8 OKTOBER 2010 6. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM MANAJEMEN DAN STANDAR KEBERHASILAN OPS POLRI 7. KIR INTELKAM	1. KAPOLRES PESISIR SELATAN SELAKU KEPALA KOMANDO PENGENDALI LAPANGAN (KKPL) BERTUGAS MENENTUKAN TEMPAT MENDIRIKAN POS KPL, MENILAI SITUASI DARURAT YANG TERUS BERUBAH, MENUGASKAN STAF YANG DIPERLUKAN, MENGENDALIKAN OPERASIONAL BAGIAN-BAGIAN DARI SISTEM KPL DAN MEMBERIKAN PENGARAHAN ATAU BRIFING AWAL DAN MEMULAI PROSES PERENCANAAN BERDASARKAN ANALISIS FAKTA YANG DITEMUKAN 2. KABAG OPS BERTANGGUNG JAWAB MENERIMA PENGARAHAN/BRIFING DARI KEPALA OPERASIONAL YANG TENGAH BERLANGSUNG SESUAI DENGAN RENCANA KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA, MELAKUKAN KEGIATAN PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA, MENKOORDINASIKAN KEGIATAN BAGIAN OPERASI DENGAN SEMUA STAF BAGIAN LAINNYA, MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA KEPALA KPL BERKAITAN DENGAN LOKASI KEGIATAN PENDUNGGUNG, SUMBER DAYA DAN PERKEMBANGAN SITUASI TAKTIS, MEMASTIKAN LAPORAN KEBAGIAN LOGISTIK BAHWA JUMLAH SUMBER DAYA, PERSEDIAAN MAKANAN, PERSEDIAAN BARANG DAN TEMPAT TINGGAL SUDAH MENCIUKUPI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, KABAG OPS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KEPALA KPL/KAPOLRES PESISIR SELATAN 3. KASAT INTELKAN MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENYEDIAKAN INTEL SEHUBUNGAN DENGAN PENCEGAHAN, PENDEKTESIAN DAN OPERASI PENGANTISIPASIAN KEGIATAN PENGAMANAN OPERASI, MELINDUNGI INFORMASI YANG SENSITIF MENCAKUP INFORMASI RAHASIA, INFORMASI PENEGAKAN HUKUM, DAN INFORMASI UNTUK KALANGAN TERBATAS, MENGUMPULKAN DAN MENGHANALISA INTEL YANG MASUK DARI SEGALA SUMBER, MENENTUKAN INTEL YANG MASUK APAKAN BISA DITERAPKAN ATAU TIDAK.	

	<p>DISESUAIKAN DENGAN TINGKAT KEPENTINGANNYA DAN KEHANDALANNYA.</p> <p>4. BAGIAN PERENCANAAN DIPIMPIN OLEH KEPALA BAGIAN PERENCANAAN (KABAG REN POLRES PESISIR SELATAN) MEMPUNYAI TUGAS MENERIMA PENGARAHAN/BRIFING DARI KEPALA KPL/KAPOLRES PESISIR SELATAN, MENGUMPULKAN SEMUA INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENANGGULANGAN BENCANA, MENGANALISI DAN MENGEVALUASI INFORMASI YANG DIPEROLEH, MENENTUKAN RENCANA KEBUTUHAN SEMUA SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN, MEMETAKAN LOKASI BENCANA DAN MENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN MEMBUAT PERKIRAAN CEPAT (KIRPAT) TERHADAP PERUBAHAN-PERUBAHAN SIGNIFIKAN YANG TERJADI ATAS STATUS PENANGGULANGAN BENCANA SERTA MEMBUAT CATATAN HARIAN UNIT .</p> <p>5. BAGIAN LOGISTIK /BAG SUMDA MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENERIMA PENGARAHAN /BRIFING DARI KEPALA KPL, MERENCANAKAN DAN MENKOORDINASIKAN KEGIATAN LOGISTIS SERTA MELAKUKAN SUPERVISI TERHADAP PERSONEL YANG DITUGASKAN , MENGUSULKAN LOKASI PANGKALAN AJU KEPADA KPL , MENGANGKAT PERSONIL SEBAGAI ANGGOTA BAGIAN LOGISTIK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, MENDATAKAN DAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA, MENYEDIAKAN, MEMELIHARA DAN MENGENDALIKAN SUMBER DAYA YANG BERUPA PERALATAN , FASILITAS TERTENTU, DAN JASA KOMERSIL, MENKOORDINASIKAN DAN MEMPROSES PERMINTAAN SUMBER DAYA, MEMPERSIAPKAN RENCANA KEGIATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA, MEMASTIKAN BAHWA PERMINTAAN PERALATAN KOMUNIKASI PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA TERPENUHI .</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sat Intelkam 2. SOP Sat Restrim 3. SOP Sat Sabhara 4. SOP Sat Narkoba 5. SOP Sat Lantas 6. SOP Polsek Seajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Dinas R2 dan R4 2. Komputer 3. Perlengkapan SAR 4. ATK 5. HT
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pembuatan Renpam disesuaikan dengan perkiraan Inteljen khusus dari Sat Intelkam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register 2. Kirsus/Kirkat dari Sat Interkam

NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHEKLIST		KET	
		KABA G OPS	KAS AT IK	KAB AG REN	KAB AG SUM DA	KAS AT BINM AS	KAS AT SAB HAR A	KASI PROP AM	KABA G OPS	KELENGK APAN	WAKTU	OUT PUT	SESU IA		TIDAK SESU AI
1.	Kapolres Pesisir Selatan selaku KPL memberikan arahan atau briefing awal dan memulai proses perencanaan berdasarkan analisis fakta yang ditemukan									Komputer dan ATK	tentatif	Seluruh pelaksana penanggulangan bencana mengerti tugasnya			
2.	Kabag OPS setelah menerima pangarahan/briefing dari KPL/Kapolres Pesisir Selatan langsung mengendalikan atas kegiatan personel sesuai dengan rencana kegiatan penanggulangan bencana									- Kendaran - Surat perintah tugas Lidik	tentatif	Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan hasil arahan KPL/Kapolres Pesisir Selatan			
3.	Kasat Intelkam menyediakan bahan laporan sehubungan dengan pencegahan/pendektesian dan operasi pengantisipasi									Komputer dan ATK	1 Hari	Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan KIR yang telah dibuat			
4.	Kabag Ren mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana serta menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh									- Data informasi - Komputer - ATK	30 Menit	Pendataan bisa akurat sesuai dengan bencana yang terjadi			
5.	Bagian logistik merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan logistik serta melakukan supervisi terhadap personel yang ditugaskan									- Kendaran Angkutan R2 dan R4 - ATK	tentatif	Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi dengan baik			
6.	Kasubag Humas/ Bag OPS mendirikan pusat informasi, mengatur ruang kerja, materil									- Panel data - Tabulasi	10 Menit	Semua data tentang terjadinya			

	dan penempatan staf yang mendapat persetujuan dari KPL									- Buku register - ATK		bencana dapat terkumpul diposko, sehingga memudahkan untuk mencari data			
7.	Kasi Propam memonitor dan menilai situasi yang berbahaya dan tidak aman									- Kompu ter - Data LO - Kasi	20 Menit	Agar jangan terjadi korban personil dalam pelaksanaan penanggulangan bencana			

Lampiran 10. Lembar Komitmen



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

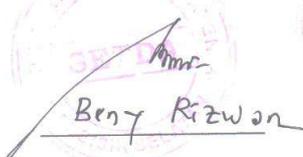
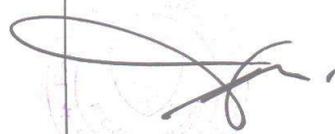
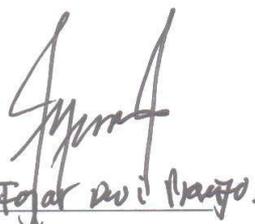


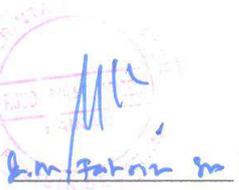
Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613, Email , bpbdpessel84@gmail.com

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempabumi dan Tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan di Hotel Saga Murni Sago, Jl Sudirman, pada tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2023, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Koordinator	Pelaku
1	Diseminasi Rencana Kontingensi		
2	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi		
3	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun		
4	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi		
5	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana bukan yang direncanakan tanggapan daruratnya tetapi mempunyai karakteristik tanggapan darurat yang serupa		
6	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana direncanakan tanggapan daruratnya dan menjadikannya sebagai lampiran Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana		
7	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan		

<p>1</p>  <p><u>MAWARDI ROKRO, SIP</u></p>	<p>2</p>  <p><u>I.F.H. DONI GUSRIZAL, MM</u></p>	<p>3</p>  <p><u>NUR LATIFA, SE, M.S.</u></p>
<p>4</p>  <p><u>Beny Rizwan</u></p>	<p>5</p>  <p><u>FERRO YUANDHA PURNI, STP</u></p>	<p>6</p>  <p><u>SATWANIZAL</u></p>
<p>7</p>  <p><u>TIKA MARTI</u></p>	<p>8</p>  <p><u>MERZAL Df. Fauz</u></p>	<p>9</p>  <p><u>Fajar Dwi Nugro</u></p>
<p>10</p>  <p><u>MIMI RIARTY, S</u></p>	<p>11</p>  <p><u>DWIGITA, S.P., M.Si</u></p>	<p>12</p>  <p><u>DI AREFA</u></p>
<p>13</p>  <p><u>JUNAIDI</u></p>	<p>14</p>  <p><u>HERMAN BUDIAT</u></p>	<p>15</p>  <p><u>ZULKIFLI</u></p>

<p>16</p>  <p><u>MUKHRIDAL, SH.</u></p>	<p>17</p>  <p><u>HADI SUSILO.</u></p>	<p>18</p>  <p><u>DEWIKA S.</u></p>
<p>19</p>  <p><u>SYAFRIAN, SH.</u></p>	<p>20</p>  <p><u>WENDRA Y.</u></p>	<p>21</p>  <p><u>Yusuf Fauzan</u></p>
<p>22</p>  <p><u>Firdaus S.Pi</u></p>	<p>23</p>  <p><u>AL ARIZAL ARIZAL, M.P.H</u></p>	<p>24</p>  <p><u>Yusuf Fauzan</u></p>
<p>25</p>  <p><u>Dominges</u></p>	<p>26</p>  <p><u>Wahyu Mursyid</u></p>	<p>27</p>  <p><u>Rizki Nur Hafidha</u></p>
<p>28</p> <p><u>H. Benny Jovial</u></p>	<p>29</p>  <p><u>Eri Darnen Putra</u></p>	<p>30</p>  <p><u>LAHAEDI PITERSON</u></p>

<p>31</p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>HERMAN</u> 1403 NPM</p>	<p>32</p> <p><i>Handwritten: SAKUN I</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>SRI WAHYU S.P</u></p>	<p>33</p> <p><i>Handwritten: PAINAN JELANGAS</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>ROVEL KURNATMA S.P</u></p>
<p>34</p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>FAJAR P</u></p>	<p>35</p> <p><i>Handwritten: CALIDO</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i></p>	<p>36</p> <p><i>Handwritten: PAINAN</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>BASWARDI</u></p>
<p>37</p> <p><i>Handwritten: BKM</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>Dr. IRMA</u></p>	<p>38</p> <p><i>Handwritten: TIARA BUNDA</i></p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>REZI ENDRAEGANI</u></p>	<p>39</p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>SUHENDIYAN</u></p>
<p>40</p>  <p><i>Handwritten signature</i> <u>SRI SETIORDI S.P</u></p>	<p>41</p> <p>_____</p>	<p>42</p> <p>_____</p>

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Painan, Kec. Iv Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan,
 Sumatera Barat



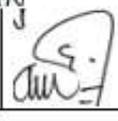
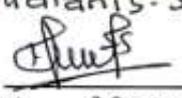
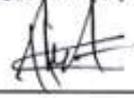
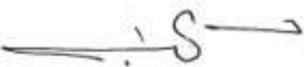
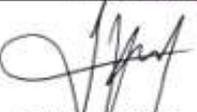
Berita Acara

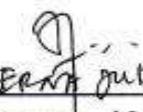
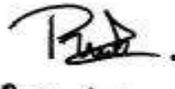
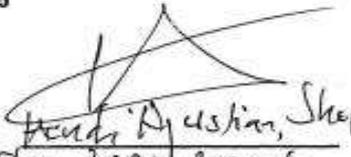
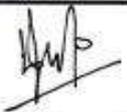
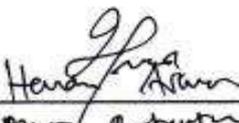
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan

Telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Draft Nol Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan, di Hotel Saga Murni, Jalan Jenderal Sudirman, Sago Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Salido, Kec. Iv Jurai, Painan, Sumatera Barat pada tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2023 secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Dalam penyusunan telah disenakati oleh Tim Perumus Penyusunan Rencana Kontingensi yang terdiri dari: BPBD Prov Sumatera Barat, BPBD Kab Pesisir Selatan, Kodim 0311/Kab Pesisir Selatan, Polres Kab Pesisir Selatan, Dinas PUPR, PDAM, PMI RAPI, BMKG, Dinas Kesehatan, Media TVRI, Disdukcapil, Camat Tarusan, Forum PRB, Diskominfo, DISDIKBUD, STAI YPI Al-Ikhlas, BPKPAD.

Daftar Penyusun yang menghadiri kegiatan Workshop Penyusunan Draft Nol Rencana Kontingensi Gempa Bumi dan Tsunami di kab. Pesisir selatan, Prov. Sumatera Barat, antara lain:

1 IRMAN  ucus eai esel	2 Budianis - SH  STAF BPBD Kab Pesi	3 OUGIA PERMAOI 
4 ACTAMAD JUNTORO  KODIM 0311/PENEL	5 Arvy Vary R.S.A BAPEDALITBANG	6 
7  CAHARI PITURKUN Sekretaris PMI Pesisir	8  REFA LINDA AYUNYI uwoa H P/O R. 4d perre C	9  DELISTIA MENGSIH CCINA-G
10  DARPIUS INDRRA BAG. Hukum	11  YULIUS HAR BPBD kab. Pesisir	12  ZULANA FERMANI, IC Staf Duta BPBD

13	 <u>ASWEN RIVAL, S.Sos</u> SUBAG BPKPAD	14	 <u>Candri Fatma</u> Staf BPBD	15	 <u>Yendriza</u> Sekretaris BPBD
16	 <u>Hendra Azwi</u> P D A M	17	 <u>Syaprial Dinevni Spd</u> KABID BUDAYA DESIL	18	 <u>ADE SAGUTRA, S.IP</u> STAR PK
19	 <u>Syantika Sri Wahyuni, M.Ed</u> STAR YPI Al- Ikhlas Bando	20	 <u>Fitri Handayani</u> Staf BPBD	21	 <u>ERMA PUTRA, S.KW. M.A</u> KABID PUP DIWIKES
22	 <u>Erwin Pulman, SKM</u> Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	23	 <u>Resty bahary syandra</u> Staf PK	24	 <u>Bambang Putra MKA</u> TURK
25	 <u>Hendri Djuliana, Skep. Man</u> Staf BPBD Pessoc	26	 <u>Wahyu Prayogo</u> Pengurus Forum PRB	27	 <u>DANI OTY BPBD</u>
28	 <u>Roni Martadinata, SS</u> Kantor Camat Tareusan	29	 <u>Depri Siswardi</u> BPBD	30	 <u>PLO NOVRIAN</u> BPBD
31	 <u>Hendy Jaya Adnan</u> Pusat Kabupaten	32	 <u>DANI PUTRA</u> BPBD	33	 <u>YUSMARDIANTO</u> DISOUKCAPIL

<p>34</p> <p><i>Jng</i> <u>Hendra Arman</u> Perkumpulan LH</p>	<p>35</p> <p>_____</p>	<p>36</p> <p>_____</p>
<p>37</p> <p>_____</p>	<p>38</p> <p>_____</p>	<p>39</p> <p>_____</p>
<p>40</p> <p>_____</p>	<p>41</p> <p>_____</p>	<p>42</p> <p>_____</p>

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

No	Nama Organisasi	Unit/Divisi/Bagian	Alamat	No. Telpon/Faksimili	Email	Narahubung (contact person)	Jabatan	No. Telpon	No. HP	Email	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	Cakupan wilayah kerja
1	TVRI Sumatera Barat	Penyiaran Program Berita Sumatera Barat Hari Ini	Jalan Raya By Pass KM.16 Koto Panjang, Padang	0751-463131	humas@tvrisumbar.co.id	08117057788	Kontributor TVRI Sumbar untuk Kab. Pesisir Selatan		081363016568	bambangnikoputra@gmail.com	Melaksanakan Peliputan untuk mendukung program siaran berita TVRI Sumbar	Di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
2	PMI Pesisir Selatan	Pelayanan Kemanusiaan	Jl Koto Tinggi Painan	081363539445	lahardipiterson@gmail.com	081363539445	Sekretaris PMI Kabupaten Pesisir Selatan		081363539445	lahardipiterson@gmail.com	Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya., memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan pembinaan relawan, Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan, Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan, Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri, Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial, Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah	Di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
3	PDAM Tirta Langkisau	Pelayanan Air Bersih	Jl. Perintis Kemerdekaan, Painan	0756-21607	pdampessel@gmail.com	Hendra Azmi	Kabag. Teknik		085265855358	hendrazmi70@gmail.com	Melaksanakan Pendistribusian Air Bersih	Di 13 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
4	Kodim 0311/Pessel	TNI AD	Jl. Padang - Bengkulu Painan	082268597299		Achmad Suntoro	Pasiter		081220057674	achmadsuntoro94@	melaksanakan perbantuan bencana alam secara menyeluruh	seluruh wilayahessel

										gmail.com		
5	Nagari Taratak	Pemerintahan Nagari	Jln. Raya Inderapura-Painan	082382229965	delistia nengsi h@gmail.com	082382229965	Sekretaris Nagari		082382229965	delistia nengsi h@gmail.com	Pelayanan masyarakat dan Administrasi Nagari	Wilayah Nagari Taratak terdiri dari 2 Kampung
6	Dinas Dukcapil	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil	Jl. Pemuda No. Painan	08531101981	piakpd6@gmail.com	085311031981	Fungsional Analis Kebijakan		085311031981	rahmir eady@gmail.com	Melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan	15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
7	Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Jl. H. Agus Salim Painan	0756-21218	ernajuita0808@gmail.com	085324309098	Kepala Bidang Pencegahan & Penanganan Penyakit		085324309098	ernajuita0808@gmail.com	Merumuskan dan melaksanakan Pembinaan Teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	21 Puskesmas, 3 RSUD [2 Pemerintah, 1 Swasta]
8	RAPI PESSSEL	Pengurusan Rapi Pesisir Selatan	Jl. Jend. Sudirman Sago		rapipesel0314@gmail.com		Wakil Ketua		085363257337	arman caniago3005@gmail.com	Melaksanakan Perbantuan Bencana Alam Menyeluruh (Radio Antar Penduduk Indo)	Di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
9	Bapeda litbang	Bidang Perekonomian, SDA, Infracwil	Jl. Jend. Sudirman no. 532 Sago	0756-7464131	bapeda litbang @pesisirselatankab.go.id	Rudi Anwar	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infracwil		081268924606	rudianwar74@gmail.com	Membuat dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Polres Pesisir Selatan	Hukum dan Keamanan	Jl. H. Agus Salim Painan	110	ops_re pessel @yahoo.com	Jon Mardi	Kasubag Bin Ops		085263248123	ops_re pessel @yahoo.com	Pelindung Pengayom Pelayan Masyarakat	Wilayah Hukum Polres Pesisir selatan (Perbatasan Kota Padang

												sampai perbatasan Kabupaten Muko muko)
11	Dinas PUTR	Bidang Sungai Pantai	Jl. Jend. Sudirman Sago			Ovilya Permadi	Staf Bidang Sungai Pantai		08137 18068 00	ovilyap ermadi@gmail.com	Melaksanakan Perbantuan Bencana Alam	Di 15 Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jl. H. Agus Salim Painan	117	bpbdpessel84@gmail.com	Defrisiswardi	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		08537 43482 82	defri062021@gmail.com	Melakukan operasi penanggulangan dan penyelamatan serta evakuasi	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Dinas Sosial, PPrPA	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial & Penanganan F.M	Jl. Ilyas Yacub Painan	(0756)46 5208	dinsos pprpa32@gmail.com	Zulwar Fernadi	Staf Bidang Linjamsos		08137 73050 91	czulwar@gmail.com	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kabupaten Pesisir Selatan
14	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Kasi Trantib	Jl. Raya Padang-Painan	08126741 930	ronima rtadinata80@gmail.com	Roni	Kasi Trantib		08126 74193 0	ronima rtadinata80@gmail.com	Melakukan Pengamanan dan Pelaporan terkait Bencana Alam	Kecamatan Koto XI Tarusan
15	Sekolah Tinggi Agama Islam Painan	Pendidikan/ Tenaga Pendidik	Jl. Parak Gadang No.005 Kamp Sago Salido Kec. IV Jurai Painan Pesisir Selatan	0756- 7464119	stai.painan@yahoo.co.id	Syartika Sri Wahyuni	Dosen/Sekretaris Jurusan PIAUD		08217 19985 56	tikasyar7@gmail.com		Kabupaten Pesisir Selatan
16	Dinas	Bidang	Jl. H. Agus	0821-	syafriiz	Syafrizal	Kepala					

	Pendidikan dan Kebudayaan	Kebudayaan	Salim Painan	8379-4001	aldihendri22@gmail.com	Dihendri	Bidang Budaya					
17	Dinas Perkim Tan LH	Bidang Perumahan Kawasan Permukiman	Jl. Pahlawan Rawang Painan Kecamatan IV Jurai	(0756)	disperkimtan@pesirseltankab.go.id	Hendra Arman	JFT. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		081267007474	hendra1980125@gmail.com	Menyusun Rencana dan Program Kerja Bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Pesisir Selatan
18	Dinas Kominfo	Bidang Statistik dan Persandian	Jl. Dr. Mohd. Hatta Painan	(0756)2312227	kominfo@pesirseltankab.go.id	Al Muhammad Yazin	Staf Bidang Statistik dan Persandian		082388358272	muhammadyazin41@gmail.com		Kabupaten Pesisir Selatan
19	BPKPAD	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan	0852-7422-2828	bpkpad.kabpessel@gmail.com	Aswen Rizal	Kasubag Umum dan Kepegawaian		085274222828	Aswenrizaltio@gmail.com		Kabupaten Pesisir Selatan
20	PLN											
21	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum										